

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN**

Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ANITA SRIUTAMI
0610310023**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG**

2010

MOTTO

...LIFE IS STRUGGLE...

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu.
(Marcus Aurelius)

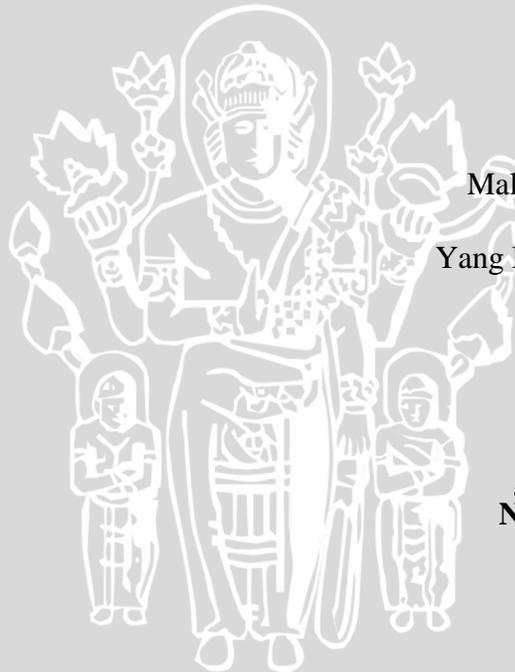
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.
(Confusius)

*Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan,
keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian,
keramahtamahan dalam memberi menciptakan kasih.*
(Lao Tse)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, 10 Januari 2010

Yang Membuat Pernyataan

Anita Sriutami
NIM. 0610310023

RINGKASAN

Anita Sriutami, 2009. **Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir PEMP dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang)**. Skripsi. Ketua Komisi Pembimbing Prof.Dr.Agus Suryono, MS, Anggota Prof. Dr. Abdul Hakim, Msi. 88 Hal + x.

Sebagian besar masyarakat pesisir hingga saat ini masih dalam kondisi miskin dan termajinalkan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pemerintah khususnya di Jawa Timur dirasa perlu untuk mencanangkan suatu program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat pesisir dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan. Dan program PEMP merupakan salah satu program yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut. Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, penelitian ini sangat relevan dikaji lebih dalam dengan pokok permasalahan yang mengarah pada implementasi program PEMP, manfaat yang di telah diterima oleh masyarakat dengan adanya program PEMP dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PEMP di Desa Tambakrejo.

Berlatar pada perumusan masalah tersebut, tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program PEMP yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di Desa Tambakrejo, untuk mengetahui dan mendeskripsikan manfaat yang di dapat masyarakat dengan adanya program PEMP serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian, dilakukan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan pemanfaatan data sekunder sebagai pendukung informasi. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan setelah data terkumpul dilakukan proses reduksi data, penyajian data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari program PEMP dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Tambakrejo berupa adanya LEPP-M3 Malang Selatan Jaya berupa USP yang melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakat setempat guna membantu mereka dalam mengakses dana yang diberikan pemerintah untuk membantu mereka, namun kegiatan ini belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan USP yang hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil penduduk saja. Namun terlepas dari kekurang optimalan kegiatan USP tersebut, manfaat yang sangat besar di dapat masyarakat Desa Tambakrejo terletak pada adanya SPDN dan pembinaan masyarakat setempat. Yang menjadi faktor pendukung dari program PEMP ini yaitu adanya partisipasi dari stakeholder yang ikut serta baik pengurus dan masyarakat dan sebagai

faktor penghambat yaitu adanya kredit macet serta pasokan bahan bakar yang terlambat karena lokasi yang sulit ditempuh.

Kesimpulan dari Implementasi program PEMP dalam upaya pengentasan kemiskinan ini yaitu secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya kesinambungan yang harus ditingkatkan serta masih perlu adanya perhatian dari berbagai pihak yang terkait. Dan jika ada permasalahan mengenai pelaksanaan program PEMP dapat dicari pemecahannya. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi di kalangan masyarakat pesisir ini perlu ada kesinambungan sehingga pada akhirnya mampu memperkecil angka kemiskinan.



SUMMARY

Anita Sriutami, 2009. **Implementation of the Community Economic Empowerment Program Coastal PEMP in Poverty Reduction Efforts (Studies in Fisheries and Marine Malang Regency)**. Thesis. Supervision Commission Chairman Prof.Dr.Agus Suryono, MS, Member Prof. Dr. Abdul Hakim, Msi. 88 Hal + x.

Most of the coastal community until now is still in poor condition and marginalized compared with other community groups. Therefore, the government especially in East Java is necessary to introduce a program that directly touch the interests of coastal communities and oriented to economic growth to alleviate poverty. And PEMP program is one program that is a translation of that goal. This thesis research was carried out in the Tambakrejo Village, Sumbermanjing Wetan, Malang Regency, is a very relevant study examined more deeply with the issue that led to the implementation PEMP program, which benefits have been accepted by the community with a PEMP program and also the factors that influence the implementation of the program PEMP Tambakrejo Village.

Background on the problem formulation, the expected goal is to find and describe the implementation of programs that have been implemented PEMP by the Department of Fisheries and Marine Resources in the Village Tambakrejo, to determine and describe the benefits that the community can PEMP with the program and to find out and describe the factors that affect the implementation of the program PEMP in the Tambakrejo Village Sumbermanjing Wetan Malang Regency.

The research methodology used is the method of research with a qualitative approach with a descriptive type of research. To facilitate the researchers in conducting research, data collection methods conducted through interviews, documentation and utilization of secondary data as supporting information. These data were analyzed descriptively and the data collected is the data reduction process, the final presentation of the data is inference.

Based on research results indicate that the implementation of the program PEMP in efforts to alleviate poverty in the village of Tambakrejo of the LEPP-M3 Malang Selatan Jaya of carrying out the provision of credit to local communities to assist them in accessing government funds provided to help them, but this activity has not fully running optimally. This can be seen from the implementation of USP that is only used by a minority of the population only. But despite the lack optimalan USP activity, the very large benefits to the community in Tambakrejo village lies in the SPDN and local community development. The factors supporting this PEMP program is the participation of the stakeholders that participated both board and community and as an inhibiting factor that is the credit crunch and fuel supplies were late due to a difficult location.

Conclusion of the Implementation PEMP .programs in this poverty reduction effort is in general have been going well, but still there is need for continuity to be improved and still needs the attention of various parties concerned. And if there are problems concerning the implementation of the solution dapatdicari PEMP program.

Therefore, the economic empowerment among these coastal communities need to have continuity that could ultimately reduce poverty.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Fakultas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS dan Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim, MSi, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
- 2) Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 3) Bapak Dr. M.R Khoirul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya beserta seluruh staff.
- 4) Semua Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mengajar, mendidik dan membagi ilmunya pada penulis selama ini.
- 5) Bapak Ir. Nusa Patriota beserta pihak-pihak Dinas Perikanan dan Kelautan yang telah bersedia membantu dan memberi informasi dan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.
- 6) Warga Desa Tambakrejo Kecamatan sumbermanjing Wetan yang telah bersedia untuk memberikan keterangan dan pendapatnya.
- 7) Mama dan Papa tercinta, Adekku Panji yang kusayang, terima kasih atas doa dan dukungannya.
- 8) Segenap keluarga yang telah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

- 9) Taufik Akbar S.Ab, terima kasih telah atas segenap waktu yang diberikan, perhatian, dan dukungannya.
- 10) Teman-teman kos Griya Hendar , terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya.
- 11) Teman-teman FIA Publik dan teman-teman kelas A angkatan 2006, terima kasih atas doa, dukungan, saran dan semangatnya.
- 12) Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik namun apabila masih kurang sempurna penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Malang, 10 Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
ABSTRAKSI	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Implementasi Kebijakan	9
B. Karakteristik Masyarakat Pesisir	13
C. Kemiskinan Masyarakat Pesisir.....	15
D. Pembangunan Masyarakat Pesisir	20
E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	23
F. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Analisis Data	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	
1. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan	41
2. Gambaran Umum Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan	46
B. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	

a. Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Program PEMP	54
b. Proses Pelaksanaan PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
a) Tahap Persiapan dan Sosialisasi	61
b) Tahap Pengembangan Institusi Lokal.....	63
c) Tahap Pengelolaan Dana PEMP	64
C. Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Bidang Ekonomi	
a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat	70
b. Perubahan Status Pekerjaan	71
D. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
a. Faktor Pendukung	73
b. Faktor Penghambat	74
E. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	75
2. Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Bidang Ekonomi	80
3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
a. Faktor Pendukung	82
b. Faktor Penghambat	83
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR LAMPIRAN	

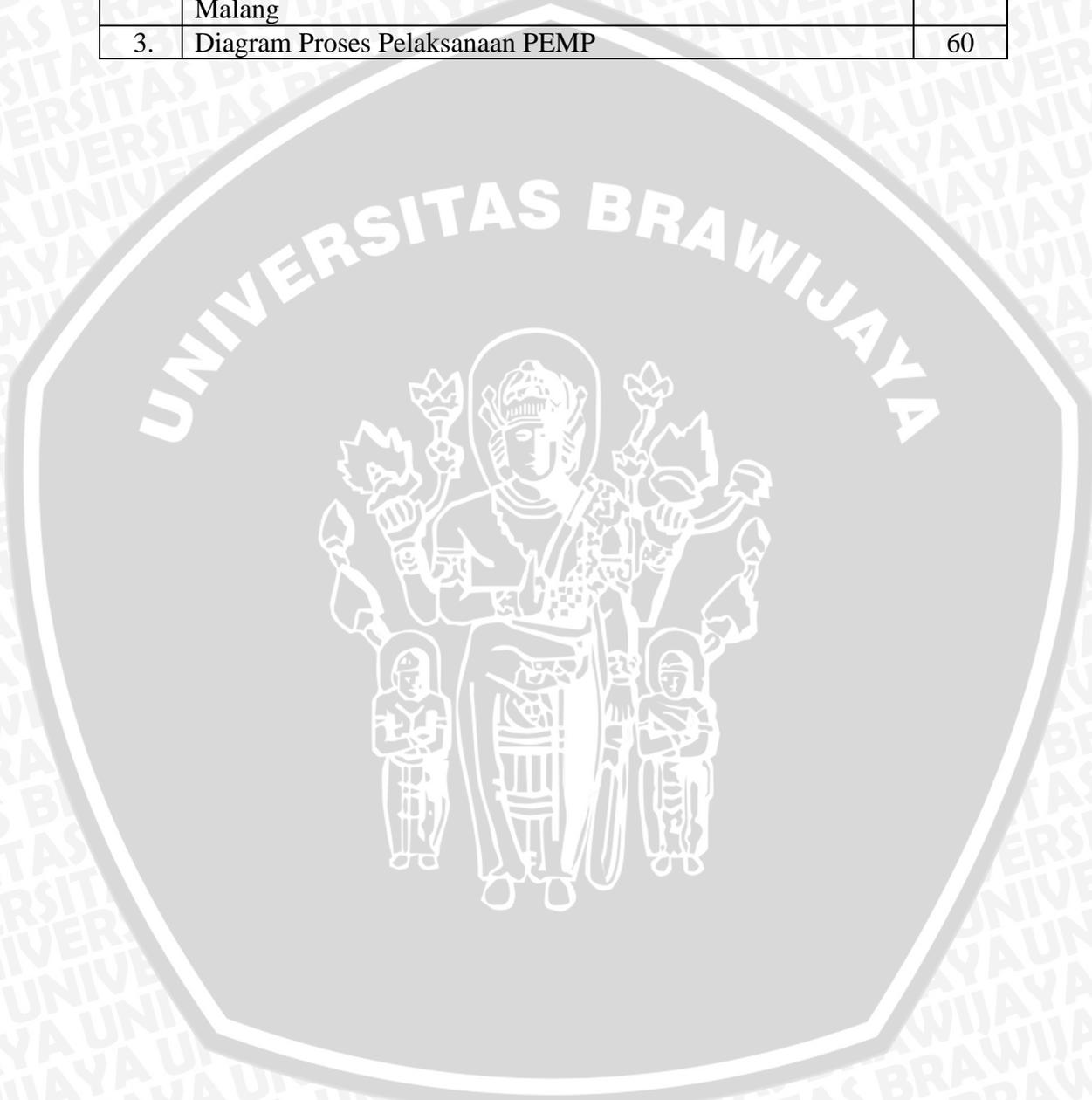
DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
1.	Pembagian Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	49
2.	Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan	50
3.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	50
4.	Jumlah Nelayan menurut kategori nelayan	51
5.	Perkembangan DEP 2006-2008	65
6.	Jumlah DEP yang diakses dalam USP 2006-2008	67
7.	Perkembangan SPDN 2006-2008	68
8.	Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat 2006-2008	69
9.	Perkembangan pendapatan masyarakat yang mengakses USP 2006-2008	71



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
1.	Diagram Jebakan Kemiskinan	16
2.	Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Malang	45
3.	Diagram Proses Pelaksanaan PEMP	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan Nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea keempat telah dijelaskan tentang tujuan Nasional yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan yang dilaksanakan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat mulai aspek politik, sosial, ekonomi budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang pada hakikatnya merupakan pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan di Negara kita ini dilakukan secara merata.

Banyaknya gagasan, pandangan dan pikiran konstruktif tentang pembangunan membuat interpretasi tentang pembangunan yang lebih baik berkembang dari masa ke masa. Dan babak pembangunan di negara kita inipun telah berada pada pendekatan pembangunan pada fase Pemberdayaan. Konsep "*empowerment*" atau pemberdayaan yang dibidangi oleh Friedmann (1992) muncul karena adanya dua hal yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Kegagalan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan pada dasarnya karena pembangunan yang dilaksanakannya kurang memperhatikan partisipasi masyarakat dimana masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka dan mandiri. (1) unik dalam konteks kemajemukan manusia; (2) merdeka dari segala belenggu internal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan; (3) mandiri untuk mampu menjadi programer bagi dirinya dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama (Kusnadi, 2006: 29).

Dilihat dari segi georafis negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan sangat potensial, antara lain berupa perairan laut seluas 5,8 juta km², dengan garis pantai terpanjang di dunia yaitu 81.000 km, dan terdiri dari 17.508 pulau, perairan laut Indonesia memiliki potensi eksploitasi ikan berkesinambungan 6,26 juta ton per tahun terdiri 4,4 juta ton di perairan nusantara dan 1,86 juta ton di *Zona Economy Execlusive* (ZEE). Pemanfaatan potensi ini telah meningkat, namun belum signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nelayan (DKP RI, 2003 b; Danuri, et. Al, 2001). Dampaknya antara lain adalah kemiskinan menimpa 90% nelayan pada tahun 1990 yang notabene adalah penduduk desa pesisir dan pada tahun 2009 ini angka kemiskinan telah menurun menjadi 32%. Jumlah desa pesisir sekitar 9.515 dari lebih 67.439 desa di Indonesia (Siaran Pers DKP No.6/01/2009).

Di masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan. Mengenai kehidupan sosial ekonomi, masyarakat pesisir telah mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka, khususnya yang tergolong nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil, hidup dalam kubangan kemiskinan. Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, diantara beberapa jenis kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan. Adanya jaminan

memenuhan kebutuhan pangan setiap hari sangat berperan besar untuk menjaga kelangsungan hidup mereka (Kusnadi; 2006).

Isu-isu kemiskinan nelayan mulai mencuat kepermukaan ketika memasuki awal tahun 1980. Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di tanah air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional. Definisi umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan dan fasilitas hidup lainnya sehingga setiap aktivitas maupun usahanya menjadi sangat terbatas (Sulistiyani, 2004: 17).

Bertolak dari isu-isu kemiskinan yang ada dalam kehidupan masyarakat pesisir tersebut maka pemerintah sadar bahwa pembangunan di kawasan pesisir juga perlu dibenahi, sejak masa reformasi hingga sekarang, pengelolaan potensi sumber daya kelautan mulai mendapat perhatian dari negara seperti pada tahun 1999 pemerintahpun membentuk suatu institusi yang bertugas mengurus aspek kelautan dan perikanan, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan pada lingkup nasional dan Dinas Kelautan dan Perikanan pada lingkup daerah. Salah satu tujuan dari dibentuknya institusi ini yaitu untuk memberdayakan masyarakat di kawasan pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir ini diperkuat dengan adanya UU Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tercantum dalam pasal 63 tentang Pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir. Satu dari sekian banyak program Departemen/Dinas Kelautan dan Perikanan yang memberi perhatian khusus terhadap upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan adalah diluncurkannya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Program PEMP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2001 sebagai bagian dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada tahun 2009 telah menjangkau 289 kabupaten/kota berpesisir.

Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini, pemerintah ingin mengobati rasa sakit masyarakat pesisir yang selama ini terabaikan oleh gerak pembangunan. Program kegiatan ini latar belakangnya oleh isu aktual kenyataan bahwa hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir, terutama masyarakat nelayan masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah belum mampunya masyarakat pesisir mengakses permodalan usaha dari lembaga perbankan dan belum adanya program perbankan untuk masyarakat pesisir. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi sumber-sumber pembiayaan yang dapat diakses, produk/program yang ada di perbankan, mekanisme dan persyaratan pengaksesan serta ketiadaan anggaran. Oleh karena itu secara simultan perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir agar mampu mengakses permodalan dan mengelolanya secara benar. Menurut ketentuan *Asian Development Bank*, kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi terhadap kelompok-kelompok masyarakat demikian harus memiliki sifat : berbasis lokal (mikro), berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis kemitraan, holistik, dan berkelanjutan (Zubaedi, 2007: 99).

Kabupaten Malang memiliki panjang pantai kurang lebih 85,92 km melintasi 6 kecamatan yaitu, Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur dan Donomulyo. Dan terdapat 4 kecamatan yang mendapatkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Bantur, Tirtoyudo dan Ampelgading. Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malang tersebut Kecamatan Sumbermanjing Wetan tepatnya di Desa Tambakrejo merupakan lokasi sasaran yang masuk dalam kategori miskin dan Program PEMP telah dilaksanakan. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud didalam tulisan ini adalah upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang implementasinya berupa Unit Simpan Pinjam (USP), SPDN serta adanya pembinaan

terhadap masyarakat nelayan di desa tersebut dengan mengkaji bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program PEMP yang dilaksanakan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat setempat beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menarik untuk diteliti sebagai bahan kajian dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan khususnya pembangunan yang berdimensi kerakyatan dimana hasil akhirnya yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”** (*Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?
2. Apa manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir (PEMP) tersebut terhadap kehidupan perekonomian masyarakat pesisir di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

2. Untuk mendeskripsikan manfaat dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) terhadap kehidupan perekonomian masyarakat pesisir di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis (akademis)

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

2. Aspek Praktis

- a. Bagi instansi terkait, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan kebijaksanaan terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, sekaligus sebagai sumbangan pikiran terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- b. Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi bahan studi dalam melakukan penelitian, serta digunakan sebagai sarana pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah maupun yang akan dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB 2 Tinjauan pustaka, berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi. Disini dijelaskan mengenai karakteristik masyarakat pesisir, kemiskinan masyarakat pesisir, pembangunan masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir serta Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

BAB 3 Metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan, berisi tentang penyajian data, analisa dan interpretasi data dalam penyajian data, data yang diperoleh dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan diungkapkan dan diuraikan. Dalam penyajian data dikemukakan gambaran umum lokasi, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang serta keadaan kelautan dan perikanan Kabupaten Malang yang mengerucut pada gambaran umum lokasi pelaksanaan Program PEMP di Desa Tamakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, implementasi Program PEMP yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Malang di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, manfaat Program PEMP oleh masyarakat sasaran program, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

BAB 5 Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan disertai saran-saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan yang kemudian dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi apakah kebijakan tersebut layak ataukah tidak layak sehingga perlu adanya perubahan. Kamus Webster (Wahab, 1991:50) secara singkat merumuskan implementasi yaitu “*to implement*” (mengimplementasikan), “*to provide the means for carrying out*”(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu),”*to give practical effect to*” (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Lebih lanjut Wahab(1991: 51) dengan mengutip pendapat A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahnkannya pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian”.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan itu sesungguhnya menyangkut tindakan atau perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, maka kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu : 1) Ketaatan target group; dan 2) Ketaatan para pelaksana.

Pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (1991: 51) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan hal ini, maka ada tiga variabel pokok yang mendapat penekanan dalam proses implementasi, yaitu :

1. tindakan-tindakan individu/pejabat;
2. lembaga-lembaga pelaksana;

3. sasaran/tujuan.

Model kebijakan dalam implementasi kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan tersebut dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Terdapat tiga model implementasi kebijakan yang terus berkembang dan akhirnya seringkali digunakan dalam pola pelaksanaan kebijakan. Seperti yang telah dikemukakan Wahab (1991: 56-57), model-model tersebut diantaranya :

a. *“The Top Down Approach”* yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn.

Dengan model ini, implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik melalui syarat-syarat, diantaranya :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius.
- 2) Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan Sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 6) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model ini lebih menekankan pada kebijakan aktor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

b. Model Proses Implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn.

Dengan model ini implementasi kebijakan dipandang sebagai prosedur-prosedur yang meliputi konsep-konsep seperti: perubahan, control, dan kepatuhan bertindak. Model kebijakan ini juga mempunyai variabel yang saling terkait diantaranya:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan.
- 2) Sumber-sumber kebijakan.
- 3) Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana.
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 5) Sikap para pelaksana.
- 6) Lingkungan ekonomi, social, dan politik.

c. Kerangka Analisis Implementasi yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Dalam model ini, implementasi kebijakan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori dasar, yaitu:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- 2) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- 3) Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan ke dalam praktek. Namun, tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsir dalam Wahab (1991: 61) dinamakan sebagai *implementation gap*, sebagai suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau perstasi dari pelaksanaan kebijakan).

Perbedaan tersebut kemudian dijelaskan oleh Walter Williams dalam Wahab (1991: 61) menyebutkan *implementation capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan atau kebijakan (*public decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumental kebijakan dapat dicapai.

Soenarko (2000: 185) mengemukakan pendapatnya bahwa pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik tersebut dapat gagal atau tidak disebabkan karena beberapa hal yang sangat pokok dan mendasarkan antara lain :

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karena harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut.
- b. Saran yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak tepat.
- c. Sarana itu mungkin atau tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- e. Ketidakpastian factor intern atau factor ekstern.
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu banyak lubang
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
- h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tidak selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Disinilah peranan penting yang dimainkan oleh pelaksana kebijakan dan harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna mengadakan *reformulation* sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya.

Islamy (1997:107) mengatakan bahwa suatu kebijakan publik menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara. Selanjutnya, Soenarko (2000:186-187) menjelaskan lebih lanjut :

“Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu : a) persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat; b) isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu; c) pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran; d) pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan; e) pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan; f) pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan”.

B. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Menurut Soekanto (1990: 13) masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia keseluruhan yang selalu berubah inilah yang dimaksudkan masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang mempunyai tempat tinggal tertentu dimana para anggotanya memiliki kesamaan kepentingan sehingga menimbulkan ikatan batin di antara mereka.

Sedangkan pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, di mana batas wilayah pesisir ke arah darat adalah jarak secara *arbitrer* dari rata-rata pasang tinggi (*mean high tide*), dan batas ke arah laut adalah batas yuridiksi wilayah propinsi atau *state* di suatu negara (Dahuri dalam Kusnadi, 2001).

Jadi masyarakat pesisir adalah suatu komunitas yang pada umumnya mendiami daerah disepanjang pesisir dekat pantai, yang kehidupannya berbasis pada sumberdaya laut dan pesisir serta mempunyai ciri menggunakan wilayah pesisir dan lautan (*common property*) sebagai faktor produksi (DKP, 2003).

Menurut Kusnadi (2006: 37) Masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Diantaranya adalah kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Sebagian besar masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsistem, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga

sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek

Dixon dalam Siswanto (2008: 20) menyatakan bahwa ciri penting dari penduduk di pedesaan pesisir adalah kepemilikan sarana dan prasana perikanan seperti kail, jala dan kapal atau perahu sebagai aset produktif yang penting atau modal dari kesejahteraan dan kekuatan politik.

Lebih lanjut berdasarkan aspek geografis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir. Mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya dari upaya mengelola sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya, yakni di kawasan pesisir (laut), dan pulau-pulau kecil. Secara umum, sumber daya perikanan (tangkap dan budidaya) merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Karena itu, sumber daya perikanan mengambil peranan yang besar sebagai penggerak dinamika ekonomi lokal di desa-desa pesisir.

Komunitas masyarakat pesisir yang sebagian besar sebagai nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris yang petani. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapat hasil tangkapan yang maksimal maka nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan cenderung memiliki karakteristik khas, yakni keras, tegas, dan terbuka. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat pesisir khususnya nelayan sulit menerima perubahan karena mereka menganggap perubahan itu akan membawa pengaruh negatif bagi kehidupan mereka.

C. Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehidupan terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (Usman, 2004: 330). Menurut Suryono (2004: 100) mengatakan bahwa kemiskinan adalah sebagai ketidakmampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya dan ditandai oleh indikator pengangguran dan keterbelakangan yang

kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004: 27) kemiskinan dilihat dari sisi *poverty profile* masyarakat, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata; tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

Suharto (2005: 132) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri, diantaranya :

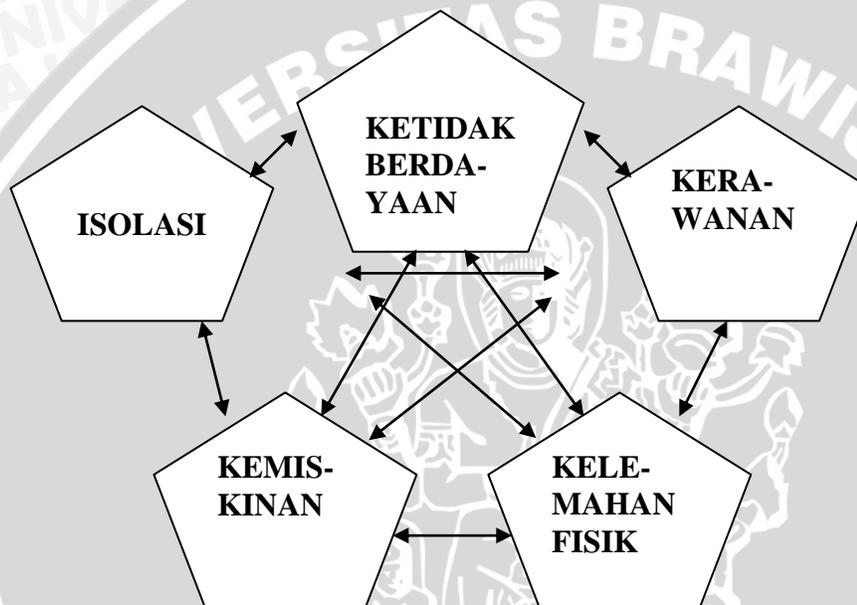
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun missal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan social (anak terlantar, wanita korbantindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Lebih lanjut Dewanta dalam Suryono (2004: 101) mengidentifikasi beberapa penyebab orang menjadi miskin antara lain (1) kerana perbedaan akses ekonomi yang dimiliki; (2) ketidakberuntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin; (3) ketimpangan distribusi; (4) pembangunan analog sebagai ideology; (5) Strategi Pembangunan dan industrialisasi, dan (6) intervensi pemerintah (sebagai *eksekutor-pen*).

Chambers (1987: 145) lebih lanjut mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya terletak pada apa yang disebut "*deprivation*

trap” atau jebakan kemiskinan, dimana jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu: kemiskinan itu sendiri (*coverty*), kelemahan jasmani (*physical weakness*), keterasingan (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*) dan ketidakberdayaan (*powerless*). Adapun “*deprivation trap*” atau jebakan kemiskinan yang dimaksud dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Jebakan Kemiskinan (*Deprivation trap*)



Sumber : Diadopsi dari Chambers (1897: 145)

Kelima unsur tersebut saling kait mengkait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga merupakan perangkat kemiskinan benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup masyarakat atau keluarga miskin. Dari kelima perangkat kemiskinan tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama. Kerentanan menurut Chambers, dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu yang guna menghadapi situasi darurat. Ketidakberdayaan keluarga miskin dimanifestasikan dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan.

Dengan kata lain, menurut Siagian (2005: 80) bahwa penduduk miskin dihadapkan pada “lingkaran setan” yang mengandung komponen :

1. Pendapatan perkapita rendah.
2. Yang berakibat pada ketidakmampuan menabung.
3. Yang pada gilirannya berakibat pada tidak adanya investasi.
4. Tidak adanya investasi berarti tidak adanya perluasan usaha.
5. Tidak adanya perluasan usaha berarti makin sempitnya kesempatan kerja.
6. Sempitnya lapangan kerja berarti tidak adanya penghasilan.
7. Tidak adanya penghasilan berakibat pada tidak bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Lebih lanjut disimpulkan bahwa pada dasarnya kemiskinan suatu proses panjang yang melibatkan adanya interaksi berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya. Kemiskinan muncul bukan sebagai sebab namun lebih sebagai akibat dari adanya situasi ketidakadilan, ketimpangan dan ketergantungan dalam struktur masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mensejahterakan hidup mereka.

Menurut Boeke dalam Siswanto (2008: 19) proses kemiskinan di negara berkembang khususnya keterkaitannya dengan proses pembangunan di negara maju bisa dilacak dari aktivitas ekonomi pedesaan, yang merupakan sentra aktivitas ekonomi di negara berkembang. Pedesaan di Dunia Ketiga lazim dideskripsikan sebagai tempat bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas termasuk perikanan, kehutanan, dan lain-lain). Desa adalah suatu masyarakat para petani yang mencukupi hidup sendiri (swasembada).

Menurut Kusnadi (2006: 24) kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu :

- 1) *Kemiskinan struktural*, kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam.
- 2) *Kemiskinan super-struktural* adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada

pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya.

- 3) *Kemiskinan kultural* adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan.

Bertolak dari pernyataan diatas Firth dalam Kusnadi (2005: 29) kemiskinan nelayan dicirikan oleh lima karakteristik yaitu :

- 1) Pendapatan nelayan bersifat harian (*daily increments*) dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya juga sangat bergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, dalam arti ia sebagai *juragan* (nelayan pemilik alat produksi) atau *pandega* (nelayan buruh). Dengan pendapatan yang bersifat harian, tidak dapat ditentukan, dan sangat tergantung pada musim, mereka (khususnya nelayan *pandega*) sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatannya. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk membelanjakan uangnya segera setelah mendapat penghasilan. Implikasinya, nelayan sulit untuk mengakumulasi modal atau menabung.
- 2) Dilihat dari pendidikannya, tingkat pendidikan nelayan atau anak-anak nelayan pada umumnya rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan.
- 3) Dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan oleh nelayan, maka nelayan lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Selain itu, sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan, menimbulkan ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang. Hal ini menyebabkan harga ikan dari nelayan dikuasai oleh pedagang.
- 4) Bidang perikanan membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap yang sederhana ataupun hanya menjadi anak buah kapal (ABK).
- 5) Kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada satu mata pencaharian, yaitu menangkap ikan. Demikian pula, dalam

kegiatan pemasaran dan pengolahannya, karena umumnya hasil laut tersebut langsung dijual kepada pedagang tanpa melalui pengolahan. Kondisi wilayah pesisir yang umumnya gersang juga mengurangi kesempatan mereka untuk membuka lapangan kerja dan mengembangkan usaha disektor lainnya.

Menurut Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2005) beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan antara lain :

1. rendahnya tingkat teknologi penangkapan;
2. kecilnya skala usaha;
3. belum efisiensinya system pemasaran hail ikan;
4. status nelayan yang sebagian besar adalah buruh.

Menurut Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2005), peta kemiskinan nelayan Jawa Timur dapat tergambar seperti dibawah ini :

a. *The Poverty Headcount Index*

The Poverty Headcount Index atau *The Incidence of Poverty* menggambarkan persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita di bawahh garis kemiskinan. Berdasarkan data yang ada masyarakat desa yang tinggal di pesisir pantai Jawa Timur rata-rata sebanyak 33,86 persen dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita di bawah garis kemiskinan. Artinya sekitar sepertiga dari rumah tangga masyarakat desa yang tinggal di pesisir pantai Propinsi Jawa Timur itu miskin.

b. *The Poverty Gap Index*

The Poverty Gap Index atau *The Dept of Poverty* adalah kedalaman kemiskinan di suatu wilayah yang merupakan perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut. Kedalaman kemiskinan pada masyarakat desa yang tinggal di pesisir Jawa Timur rata-rata sebesar 7,5 persen.

c. *The Severity of Poverty*

The Severity of Poverty menunjukkan kepelikan kemiskinan di suatu wilayah. Indikator ini memperhitungkan jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan dan ketimpangan diantara orang miskin. Rata-rata kepelikan kemiskinan pada masyarakat desa yang tinggal di pesisir pantai Jawa Timur sebesar 2,42 persen.

D. Pembangunan Masyarakat Pesisir

Pembangunan menurut Siagian (1983: 3) merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu

Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa (*nation-building*). Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian : pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilaksanakan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah pada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina Bangsa dalam rangka pencapaian tujuan Bangsa dan Negara yang telah ditentukan.

Selanjutnya pembangunan menurut Suryono (2004: 37) menerangkan bahwa pembangunan berarti upaya terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga mampu keluar dan dapat berhubungan serasi, selaras dan dinamis; sedangkan ke dalam mampu menciptakan keseimbangan.

Pengertian pembangunan juga dipaparkan oleh Tjokroaminoto dalam Suryono (2004: 21) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut :

1. Pembangunan sebagai proses perubahan social menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya dari manusia yang sadar, terencana dan melembaga
3. Pembangunan sebagai proses social yang bebas nilai (*value free*)
4. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*
5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat
6. Pembangunan sebagai *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

Menurut pandangan Coralie Bryant dan Louis White dalam Ndraha (1990: 15-16) menyebutkan ada lima implikasi utama pembangunan:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. pembangunan berarti mengandung kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)
4. pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*suistainability*)
5. pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Dari pengertian beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dimana dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta hasil-hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan pada sektor kelautan pada umumnya masih didominasi oleh terminologi konsep pembangunan berkelanjutan. Namun pemikiran ini diperjelas dan dikritik oleh pakar-pakar ekonomi pembangunan. Hal ini dikarenakan pemikiran tersebut didominasi oleh pemikiran barat, sedangkan pemahaman pemikiran pembangunan memerlukan *multiple epistemology* yakni menggabungkan tradisi abstrak dalam pemikiran barat dengan tradisi historis yang menjadi ciri utama negara berkembang. Meskipun terbukti mampu menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat, karena posisi epistemologi lokal ini melemah dan tersingkir, maka perlu ditemukan metode atau upaya untuk memperkuat posisinya dalam perkembangan pengetahuan khususnya terkait dengan pembangunan termasuk pembangunan sector kelautan dan perikanan. Penguatan pengetahuan lokal mensyaratkan redefinisi dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai suatu epistemologi baru guna menunjang otonomi daerah di wilayah pesisir. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menjadikan pengetahuan local sebagai landasan utama mensyaratkan adanya ciri-ciri endogen dari pembangunan itu. Ciri-ciri ini di jelaskan oleh Friberg dan Hettne yaitu: 1) unit social dari pembangunan itu harus suatu komunitas yang dibatasi oleh suatu ikatan budaya dan pembangunan harus berakar pada nilai dan

pranatanya; 2) adanya kemandirian, yakni setiap komunitas bergantung pada kekuatan dan sumber dayanya sendiri bukan pada kekuatan luar; 3) adanya keadilan sosial dalam masyarakat; dan 4) keseimbangan ekologis yang menyangkut kesadaran akan potensi ekosistem local dan batas local dan globalnya (DKP RI dalam Siswanto, 2008: 24).

Dengan epistemologi yang demikian, dalam konteks otonomi daerah di wilayah pesisir dan laut, maka proses konsultasi lebih mudah daripada model sentralistik. Masyarakat tidak memiliki akses terhadap kekuasaan yang mengatur kehidupan sehingga negara menjadi otonom hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk masyarakat (Mubyarto dalam Siswanto, 2008 : 24).

Kusumaatmadja dalam Siswanto (2008: 24-25) menyatakan bahwa pendekatan sentralistik cenderung lamban dan tidak mempunyai daya jelajah cukup. Harus dilakukan pendekatan geografi ekonomi, bukan sektoral dan tidak hanya makro ekonomi. Dengan pendekatan geografi ekonomi maka seluruh wilayah negara kepulauan: darat, laut, udara dan digantara menjadi wilayah perencanaan yang holistik dan sinergis. Daerah menjadi pemain penting dalam proses pembangunan di era otonomi daerah. Kemampuan bermain dalam era globalisasi tergantung dari kelincahan bangsa dan kemampuan menggunakan keanekaragaman geografi, sumber daya dan bakat kultural. Otonomi merupakan suatu mekanisme yang dapat mendekatkan pemerintah dan masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan negara, politik, sosial, ekonomi, budaya, penguasaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut seharusnya tidak perlu dijalankan sepenuhnya oleh negara. Keberadaan masyarakat harus mendapat pengakuan dan tempat untuk turut berperan secara wajar dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan tanpa memperhitungkan peran dan pengakuan terhadap nelayan tradisional dan pelayaran rakyat, maka hanya sebagian anak negeri saja yang dapat menikmati kekayaan laut.

Konsep pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan berbasis lokal, bahwa pembangunan dilakukan oleh masyarakat dan melibatkan sumber daya lokal sehingga *return to local resources* dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Prinsip daya saing komparatif dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai

daya saing kompetitif. Pembangunan berbasis lokal melibatkan penduduk lokal, bukan sekedar penonton di luar sistem (DKP RI dalam Siswanto, 2008 : 25).

E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dalam studi-studi tentang perubahan sosial, konsep “pemberdayaan” (*empowerment*) merupakan antitesis dari konsep “pembangunan” (*development*). Konsep pembangunan lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat *top-down*, elitis. Sedangkan “pemberdayaan” lebih bersifat *bottom-up*, berbasis kepentingan kongkret masyarakat (Aziz dalam Kusnadi, 2006: 1). Sejak beberapa dasawarsa terakhir, penggunaan konsep pembangunan cukup intensif di Negara-negara yang sedang membangun, seperti Indonesia, untuk mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara lain yang sudah berkembang terlebih dulu. Isu-isu pemberdayaanpun menjadi wacana publik ketika kebijakan pembangunan kurang memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh warga masyarakat, khususnya pada mereka yang miskin sumber daya.

Pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua makna pokok, yakni : (a) *to give power or authority to* (artinya memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri); dan (b) *to give or enable* (artinya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan) (Priyono dan Pranaka, 1996: 3).

Bertolak dari pengertian tersebut menurut Sulistiyan (2004: 77), pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” dalam hal ini menunjukkan bahwa ada serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan secara berurutan yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang belum berdaya menjadi berdaya. Makna “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber

inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri, makna pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat tapi dari pihak lain yang mempunyai kekuatan dan kemampuan seperti pemerintah dan agen pembaharu lainnya.

Sedangkan Balai Besar PMD (2005: 58) mengklasifikasikan pengertian pemberdayaan masyarakat menjadi tiga yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat atau dengan akata lain memampukan dan memandirikan masyarakat.
- c. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan perencanaan pelaksanaan dan kepemilikan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan mengandung arti: (1) melaksanakan kemampuan dari masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Jadi konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat *“people centered, participatory, empowering and sustainable”*.

Adapun Strategi dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu strategi yang berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode inilah diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

Strategi pemberdayaan masyarakat secara konseptual menurut Balai Besar PMD (2005: 59) meliputi :

- a. Pendekatan kelompok
Secara ekonomi, sosial, budaya dan politik yang ada di masyarakat khususnya pedesaan dewasa ini masih sangat rendah atau lemah. Hal ini akan

sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara sendiri-sendiri, karena itu pendekatan kelompok adalah strategi yang paling efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan potensial dan kemampuan masyarakat dimana pada akhirnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar yang kuat dan seimbang.

b. Penguatan kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan pada dasarnya dilaksanakan karena terdapat asumsi bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada dia masyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk memajemen masyarakat dalam melakukan serangkaian program dan kegiatan. Dengan memfungsikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan melalui berbagai input pembinaan dan arahan diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat baik secara individual maupun kelompok. Disisi lain akan terjadi proses pembelajaran dengan mengorganisir kemampuan dan potensi yang mereka miliki agar berhasil secara optimal (*social learning*).

c. Pendampingan

Melalui pendampingan diharapkan akan dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri. Adapun tugas pendamping meliputi menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mengidentifikasi spesifikasi masalah dan mengorganisir masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat.

d. Pengembangan sumber daya manusia (SDM)

Pengembangan SDM merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya insani masyarakat baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan maupun kinerja mereka. Implementasi pengembangan SDM yaitu diharapkan adanya program-program kegiatan yang bersifat pendidikan dan latihan secara sistematis.

e. Pemberian stimulan

Stimulan yang diberikan biasanya berupa dana hibah baik hibah murni maupun (*revolving fund*). Dengan pemberian stimulan diharapkan ketersediaan masyarakat untuk melakukan swadaya sesuai dengan kemampuan serta mempersiapkan masyarakat secara teknis baik administratif maupun skill.

Menurut Elliot (1987) dalam Pranarka & Prijono (1996:13) di dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya “strategi pemberdayaan” yang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. *The Welfare Approach*. Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power*, yang dilatarbelakangi dengan kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri.

2. *The Development Approach*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
3. *The Empowerment Approach*. Pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, terdapat tiga proses pentahapan pemberdayaan masyarakat yang perlu dilalui (Priyono, 1996 dalam Suryono, 2006 hal. 147) yaitu:

1. Inisiasi. Masyarakat mendapatkan keberdayaan diri dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar dan diperuntukkan bagi masyarakat.
2. Partisipatoris. Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat.
3. Emansipatif Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari, oleh, dan untuk mereka.

Rintuh dan Miar (2005: 82-83) mengemukakan bahwa dalam mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat dapat melalui dua strategi. Pertama, memberi peluang agar sektor dan masyarakat modern tetap maju. Oleh karena kemajuannya dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kedua, dengan memberdayakan sektor ekonomi.

Dengan demikian strategi dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat haruslah dapat menggerakkan kemampuan masyarakat dalam berfikir, bertindak dan terlibat langsung dalam pembangunan. Idealnya dalam proses pemberdayaan dapat terjadi sinergi dari kelompok pemberi dan penerima pemberdayaan itu sendiri. Memang sangat sulit untuk merencanakan ataupun merancang strategi seperti ini, akan tetapi setidaknya kita dapat menawarkan alternative agar strategi pemberdayaan bisa mencapai tujuan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat pesisir dengan mengelola potensi sumberdaya

yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan social yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subjek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis (Kusnadi, 2008: 30).

Berdasarkan bahasan di atas Kusnadi (2008: 30) menyatakan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu bahwa: (1) pemberdayaan merupakan usaha sadar yang bersifat terencana,

sistematik, dan berkesinambungan; (2) pemberdayaan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumberdaya atau modal sosial (*social capital*) masyarakat secara optimal; dan (3) tujuan pemberdayaan adalah untuk membangun kemandirian sebagai sarana mencapai kesejahteraan social secara berkelanjutan. Tiga aspek pemberdayaan tersebut akan menentukan strategi kita dalam memberdayakan masyarakat pesisir.

Kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik (Kusnadi, 2008: 31).

Beberapa indikator kualitatif yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut (Kusnadi dkk., 2007: 27-29) :

1. Tercapainya kesejahteraan social-ekonomi: individu, rumah tangga, dan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini :
 - a. kemandirian ekonomi berkembang, orientasi kewirausahaan meningkat, dan kepercayaan diri menguat;
 - b. nilai tabungan dan investasi bertambah;
 - c. kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi optimal dan berkelanjutan;
 - d. kondisi kualitas SDM berkembang baik.
2. Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas.

3. Kelembagaan sosial atau pranata-pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrument aspirasi pembangunan local.
4. Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
5. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi : informasi, kapital, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pemabngunan yang ada di kawasan pesisir.
7. Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi eilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. Pertama, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis gender. Kedua, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya atau kelembagaan sosial. Kedua model juga bisa disinergikan. Pilihan terhadap salah satu model tersebut dalam pemberdayaan masyarakat pesisir akan banyak dipengaruhi oleh tujuan pemberdayaan, unsur-unsur yang terlibat, dan kondisi-kondisi lingkungan sekitar. Suharto (2005: 151) lebih menekankan pendekatan penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan dan melihat konsteks situasi.

Pendekatan Kelembagaan sebagai basis dalam kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut : (1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat, (2) meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan, (3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan (4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan usaha ekonomi bersama.

Jadi sebagaimana telah dijelaskan diatas, pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan sebuah proses sosial yang cukup panjang untuk mencapai tujuan. Di samping sebagai proses sosial, pemberdayaan adalah strategi, sarana, fasilitas, media, atau instrumen untuk mengantar masyarakat menuju keberdayaan dan kemandirian.

Dengan demikian, pemberdayaan bukanlah suatu tujuan atau hasil yang dicapai. Pemberdayaan adalah sarana mencapai tujuan. Pada dasarnya, tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat pesisir memiliki keberdayaan di berbagai bidang kehidupan, sehingga dengan keberdayaan tersebut mereka akan lebih mudah meraih kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

F. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 disebutkan bahwa permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi adalah:

- a. Kurang berkembangnya system kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi kompetitif.
- b. Kurangnya penciptaan akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi berupa capital, lokasi berusaha, lahan usaha, informasi pasar dan teknologi produksi.
- c. Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.

Bertolak dari Program Pembangunan Nasional diatas, menurut Rintuh dan Miar (2005: 82-83) mengemukakan bahwa dalam mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat dapat melalui dua strategi. Pertama, memberi peluang agar sektor dan masyarakat modern tetap maju. Oleh karena kemajuannya dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kedua, memberdayakan sektor ekonomi.

Oleh karena itu beberapa langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah (1) melakukan identifikasi; (2) melakukan program pembinaan yang kontinyu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendampingan; (3) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat pengembangan usaha; (4) melakukan koordinasi

dan evaluasi secara periodik antara instansi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, sumberdaya manusia, informasi pasar maupun penerapan teknologi.

Sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok saja, namun mempunyai banyak dimensi seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu untuk mengatasi kemiskinan perlu dilakukan serangan langsung terhadap penyebab kemiskinan dari berbagai dimensi tersebut. Pengentasan kemiskinan juga harus melihat kemiskinan dari dua sisi, baik dari sisi absolut maupun relatif. Sehingga perlu adanya suatu formulasi kebijakan yang mampu mengadopsi semua dimensi kemiskinan tersebut. Pemberdayaan dipandang sebagai suatu strategi yang dapat memenuhi keinginan tersebut. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi diharap dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya pada masyarakat pesisir.

Tujuan dari Program ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan lembaga keuangan mikro, mendorong kewirausahaan, dan merangsang partisipasi masyarakat dalam penguatan kapasitas berbasis masyarakat, serta mendiversifikasi usaha mikro secara berkelanjutan. Yang mana diharapkan pada berakhirnya program ini pendapatan masyarakat miskin pesisir yang turut berpartisipasi dalam proyek akan meningkat.

Sasaran program ini adalah orang yang telah memiliki usaha mikro yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perikanan dan lokasi usahanya berada di daerah pesisir untuk sektor perikanan, termasuk nelayan. Awalnya, proyek ini didesain untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir melalui penyediaan modal usaha dengan mempergunakan fasilitas dana bergulir bagi pengembangan usaha mikro produktif. Pada tingkat kabupaten, fasilitas dana bergulir dikelola oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina, LEPP-M3. LEPP-M3 dibentuk

sebagai embrio ‘perusahaan’ yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat pesisir. Desain awal proyek ini termasuk membentuk sebanyak mungkin koperasi baru untuk menyediakan jasa keuangan dan jasa lainnya bagi masyarakat pesisir.

Ada pula prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan Program PEMP adalah sebagai berikut (Pedoman PEMP tahun 2001-2008):

1. Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat (*acceptability*).
2. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat (*transparency*).
3. Pengelolaan kegiatan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (*accountability*).
4. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, (*sustainability*).
5. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk miskin (*responsiveness*).
6. Penyampaian bantuan kepada masyarakat sasaran secara cepat (*Quick Disbursement*).
7. Proses pemilihan peserta dan kegiatan PEMP dilakukan secara musyawarah (*Democracy*).
8. Pemberian kesempatan kepada kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan, agar semua masyarakat merasakan manfaat langsung (*Equality*).
9. Setiap ketentuan dalam pemanfaatan Dana Ekonomi Produktif masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan usulan kegiatan yang layak (*Competitiveness*).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pembuatan rancangan penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu metode diperlukan dalam suatu penelitian.

Metode Penelitian adalah cara-cara berpikir yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang manusia, alam dan hubungan satu dengan yang lain guna untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005: 54).

Pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2000: 4) mendefinisikan "Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)". Jadi dalam hal ini tidak boleh

Menurut Hasan (2002: 22) metode deskriptif melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Tujuan menggunakan penelitian deskriptif yaitu :

- a. Menyimpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada;
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku;
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi;
- d. Menentukan apa yang dilakukan orang dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan yang akan datang.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena pertimbangan bahwa peneliti ingin memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Dengan demikian penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus menurut Moleong (2000: 62) sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian, karena dalam penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan:

- 1) Penetapan fokus penelitian akan membatasi *study* yang akan diteliti oleh peneliti.
- 2) Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu info yang diperoleh dari lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data atau info apa yang dikumpulkan dan data atau info mana yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sudah dikumpulkan.

Dalam kaitan ini, sasaran atau fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas tentang implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, yang meliputi :
 - a. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).
 - b. Proses Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), meliputi :
 - 1). Tahap Persiapan dan Sosialisasi;
 - 2). Tahap Pengembangan Institusi Lokal;
 - 3). Tahap Pengelolaan dana PEMP;
2. Manfaat dari pemberian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Hal ini dilihat dari :
 - a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
 - b. Perubahan Status Pekerjaan.
3. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang karena desa tersebut merupakan salah satu desa di wilayah pesisir malang yang memperoleh Program PEMP.

Adapun yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Sedangkan yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
- 2) Kantor LEPP-M3 Malang Selatan Jaya.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut pendapat Lofland dalam (Moleong, 2006: 157) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang kita teliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu

1. Informan

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak di dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan pihak lain yang dapat memberi informasi terkait dengan implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Malang.

2. Dokumen

Data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi semisal skema dan bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis yakni seperti Undang-undang tahun 27 tahun 2007, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.

Sedangkan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pernyataan langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara oleh penulis dengan pihak yang memiliki kewenangan, yakni :

- a. Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Kepala Sub.bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- c. Pimpinan Bagian Program PEMP Kabupaten Malang;
- d. Pengurus LEPP-M3 Malang Selatan Jaya;
- e. Masyarakat sasaran Program PEMP.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data di lapangan. Untuk itu metode atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun metode dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur

Dalam studi literatur ini data diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, makalah-makalah, majalah dan surat kabar referensi atau rujukan

dari penelitian sebelumnya mengenai peristilahan, kerangka pemikiran dan teori yang ada serta relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka (*Face to Face*) secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab, baik dengan responden maupun dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Guna memperoleh informasi atau data secara jelas dan mendasar, juga untuk menjalin hubungan dengan partisipan agar memperlancar dalam proses penelitian.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

1. Peneliti Sendiri

Salah satu ciri peneliti kualitatif adalah memasukan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini berpengaruh terutama dalam proses wawancara dan analisa data.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang di ajukan kepada informan penelitian dan biasanya digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini. informan yang dimaksud disini yaitu Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pimpinan Bagian Program PEMP Kabupaten Malang, Pengurus LEPP-M3 Malang Selatan Jaya, Masyarakat sasaran Program PEMP.

3. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Yaitu merupakan catatan untuk mencatat hasil-hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2008: 88):

"Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain."

Analisis data dalam penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam pola, dengan memilih data dan kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Alur kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data, yaitu data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

2. Reduksi data,

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan pengolahan data, mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu (Bungin dalam Sugiyono, 2008: 93). dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemilahan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian data, tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian data ini kita akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut

4. Penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang diperoleh. Sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah diperoleh.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang awalnya merupakan Cabang Dinas milik Dinas Perikanan Propinsi Propinsi Jawa Timur dengan nama "Cabang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang". Selanjutnya sejalan dengan semangat otonomi daerah, pada tahun 1993 Dinas Kelautan dan Perikanan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dengan nama "Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang". Setelah era reformasi tepatnya di masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dimana saat itu Kelautan dan Perikanan menjadi Departemen tersendiri dengan nama Departemen Eksplorasi Laut dengan menteri Ir. Sarwono Kusumaatmadja, maka pada tahun 2001, Dinas Kelautan dan Perikananpun berubah nama menjadi "Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang". Namun pada akhir tahun 2004, sejalan diterapkannya PP 8 Tahun 2003, Dinas Kelautan dan Perikanan digabung dengan Dinas Peternakan menjadi "Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang".

Kemudian dihitung sejak tanggal 29 Pebruari 2008 seiring diterapkannya PP No. 41 Tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang menjadi Dinas tersendiri dengan nama "Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang" yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perbup No. 18 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dasar Hukum dari Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang organisasi dan perangkat daerah.
- e. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang organisasi perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Visi dari Dinas kelautan dan Perikanan berdasarkan rencana strategi DKP 2008-2010 yaitu “Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelutan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat”. Dan untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal.
2. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan iklim usaha yang kondusif.
3. Mewujudkan SDM keluatan dan perikanan yang berkualitas.
4. Menciptakan kondisi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan DKP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha keluatan dan perikanan.
3. Meningkatkan kelestarian lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk meraih visi dan misi, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran maka cara atau strategi yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan.
- b. Pemberdayaan kelembagaan kelompok dan SDM kelautan dan perikanan.

- c. Peningkatan pembinaan SDM aparatur.
- d. Peningkatan pembinaan masyarakat pesisir dalam upaya pemberdayaan.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, tujuan, visi dan misi maka dirumuskan program berikut :

1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Program pengembangan budidaya perikanan.
3. Program pengembangan perikanan tangkap.
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Berdasarkan Visi DKP dan program yang ada, khususnya dalam penelitian ini yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang juga mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan derajat kesejajaran dengan masyarakat lain”. Program PEMP ini dikelola oleh Bidang sumberdaya kelautan dan perikanan.

Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan, sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengtan bidang tugasnya.

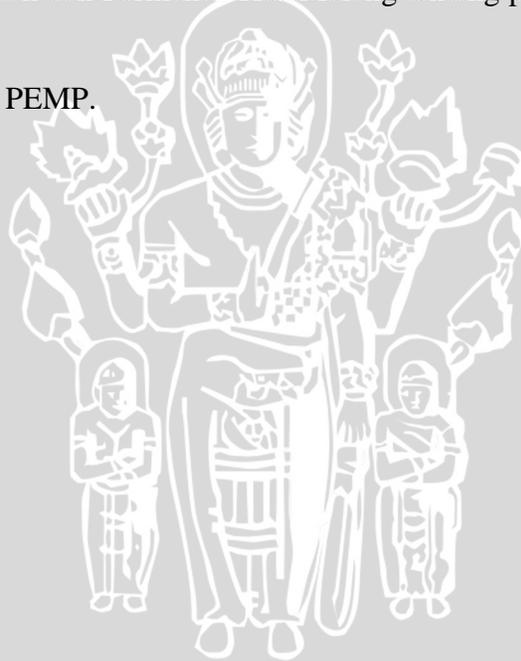
Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. Penetapan kebijakan dan perencanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Pemberian bimbingan teknis eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya alam hayati;

- d. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

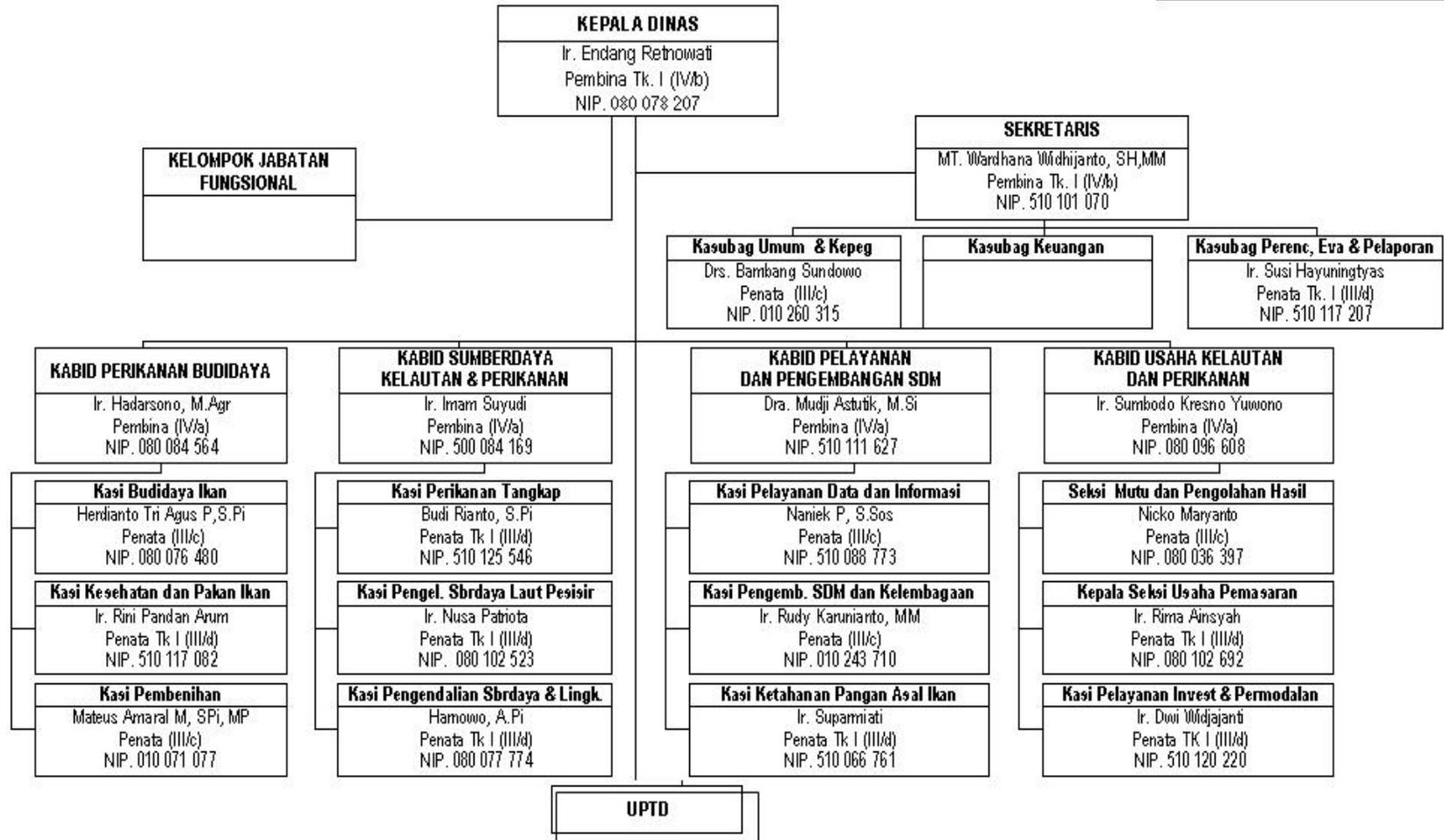
Dasar hukum dari kegiatan Program PEMP yang ada di DKP Kabupaten Malang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. SK. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No.19/KP3K/IV/05.
4. SK. Kadis Kelautan dan Perikanan Kab.Malang tentang pelaksanaan Program PEMP.
5. Pedoman Umum PEMP.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MALANG**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang
Nomor : 18 Tahun 2008
Tanggal : 29 Februari 2008



2. Gambaran Umum Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

Karakteristik geografis Indonesia serta struktur dan tipologi ekosistemnya yang didominasi oleh lautan telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai Mega-biodiversity terbesar di dunia, yang merupakan justifikasi bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara bahari terbesar di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa sumberdaya kelautan merupakan kekayaan alam yang mempunyai peluang amat potensial sebagai sumber daya yang efektif dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Berdasarkan penentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), kewenangan Indonesia untuk mengelola wilayah kelautan adalah sejauh 200 mil, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah kelautan bagi propinsi adalah 12 mil, bagi kabupaten/Kota kewenangan pengelolaan wilayah kelautannya adalah 4 mil. Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut maka kewenangan Kabupaten Malang dalam pengelolaan wilayah kelautan adalah 4 mil.

Wilayah pesisir sering kali hanya diartikan sebagai wilayah di sepanjang pantai. Pengertian ini tidaklah salah, meski kurang tepat karena dengan pemahaman seperti itu tentang pesisir akan membatasi ruang gerak maupun jangkauan pemanfaatan kawasan. Ketika pesisir dianggap hanya sebatas sepanjang garis pantai, maka potensi pesisir juga akan terbatas pada bidang perikanan semata. Padahal membahas pesisir bukan hanya berbicara tentang perikanan laut, tetapi juga perikanan darat, pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, sumberdaya manusia dan aspek-aspek lain yang menjadi bagian dari potensi besar dari kawasan pesisir tersebut.

Berdasarkan jenisnya sumberdaya kelautan dibagi menjadi sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya yang tidak dapat pulih (*Unrenewable resources*), energi kelutan dan jasa-jasa lingkungan. Secara rinci pembagian kategori sumberdaya di kawasan pesisir dan lautan adalah sebagai berikut:

- a) Sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*) seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, ekosistem pantai, pulau-pulau kecil dan lain-lain.
- b) Sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan (*unrenewable resources*) seperti berbagai jenis tambang, mineral, minyak dan gas bumi.
- c) Energi keluatan seperti energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*).
- d) Jasa-jasa lingkungan (*Enviromental services*) seperti tempat-tempat dengan panorama yang indah menyejukkan untuk pariwisata, media transportasi dan komunikasi, pengatur iklim, penyerapan limbah dan lain-lain.

Kabupaten Malang merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur yang berada di bagian selatan. Ditinjau dari luas wilayahnya, Kabupaten Malang merupakan Kabupaten terluas kedua di Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 3.397,13 km atau 7,1% dari luas Jawa Timur. Perairan laut Kabupaten Malang berada di sebelah selatan dan merupakan bagian dari samudera Indonesia dengan ciri spesifik yaitu gelombang dan arus yang besar. Pantai Kabupaten Malang membentang sepanjang 77 km melintasi 6 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading. Jumlah desa yang mempunyai wilayah pantai sebanyak 18 desa. Sedangkan desa yang mempunyai aktifitas kegiatan sebanyak 8 desa yang didukung dengan armada yang sebagian besar merupakan jenis perahu jukung dengan mesin yang digunakan rata-rata 6-13 PK, dan jenis perahu sekoci dengan mesin 20-30 PK. Dalam pelaksanaan Program PEMP di wilayah Kabupaten Malang Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan merupakan salah satu desa sasaran program dan berikut adalah gambaran umum Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

4.1 Letak Geografis dan Administrasi

Letak geografisnya adalah $08^{\circ}37'-08^{\circ}41'$ LS dan $112^{\circ}30'-112^{\circ}43'$ BT dengan ketinggian 0-100 m diatas permukaan laut. Desa Tambakrejo letaknya berada pada 157 km dari ibukota Profinsi Jawa Timur, kurang lebih 70 km sebelah Tenggara dari pusat Kabupaten Malang dengan jarak 29 km dari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Kedung Banteng
- b. Sebelah timur : Desa Tambak Asri
- c. Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Desa Sitiarjo

Kemiringan lereng cukup bervariasi, datar dengan lereng ($<3\%$), agak landai dengan lereng (3-8%), landai dengan lereng (8-15 %), agak curam dengan lereng (25-40%) dan sangat curam dengan lereng ($>40\%$). Bagian pantai Sendang Biru sebagian merupakan batuan kapur dan karang serta berinding terjal, bagian lain merupakan pantai yang agak landai dengan panjangnya relative pendek (50-100)m terdapat pada bagian timur dan barat. Perairan Sendang Biru merupakan selat berkedalaman 20 meter dengan dasar perairan pasir berkarang dengan arah arus dominan ke selatan. Kedalaman selat ini diperkirakan mampu dilengkapi kapal-kapal besar berbobot 50-100 GT.

Suhu rata-rata daerah tersebut adalah 32°C yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan hujan rata-rata 1.350 mm/tahun. Di seberang Desa Tambakrejo ini terdapat pulau Sempu yang mana pulau ini adalah pelindung pantai (*barrier*) alami. Perairan ini berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Pada jarak 50 meter dari pantai, umumnya memiliki gelombang yang relative besar terutama pada daerah-daerah yang masuk ke pantai-pantai yang curam dan terjal.

4.2 Keadaan Penduduk

4.2.1 Jumlah Penduduk

Dari hasil penelitian mayoritas penduduk di Desa Tambakrejo ini bersuku Jawa dan sebagian lainnya dari suku Madura dan Bugis (menurut informasi yang ada mereka merupakan nelayan andon yang biasanya datang pada saat menjelang musim ikan) yang berlayar dari pantai Utara Jawa. Sebagian dari pendatang ada yang tinggal sementara di perumahan sekitar Pelabuhan Pondokdadap di desa tersebut dengan alasan andon kerja, namun ada pula yang tinggal meskipun musim ikan telah usai dan akhirnya menetap karena berkeluarga dengan penduduk setempat.

Jumlah penduduk Desa Tambakrejo tercatat pada tahun 2008 sebanyak 7.493 jiwa yang terdiri dari 1.884 kepala keluarga. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 3.758 jiwa (50,18%) dan perempuan sebanyak 3.735 jiwa (49,82%). Data mengenai pembagian penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Desa Tambakrejo tahun 2008, dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Pembagian Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Laki-laki (orang)	Wanita (orang)	Jumlah
1.	Tidak Produktif (<14 th)	1034	986	2010
2.	Produktif (15-60 th)	2325	2329	4654
3.	Tidak produktif (>60 th)	399	420	819
	Jumlah	3.758	3.735	7.483

Sumber: Kantor Desa Tambakrejo, 2008

Dari hasil perhitungan diatas diketahui produktifitas penduduk di Desa Tambakrejo masih tinggi yaitu sebesar 4654 orang karena termasuk dalam usia produktif. Dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang produktif cukup memadai. Penggolongan usia produktif diatas dilatarbelakangi oleh usia tenaga kerjayang menjadi ABK yang sebagian besar merupakan lulusan SD dan SMP atau 15 tahun. Penentuan tersebut berlaku dikawasan penelitian yaitu

Desa Tambakrejo yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Warga Tambakrejo ini mayoritas beragama islam. Sebanyak 7.418 orang warga merupakan muslim dan sisanya beragama non muslim. Untuk menunjang kegiatan keagamaan, terdapat satu buah masjid dan empat buah mushola dan dua gereja.

4.2.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan kurang begitu maju. Sarana dan prasarana pendidikan umum di Desa Tambakrejo diantaranya 4 unit gedung Taman Kanak-kanak, 3 unit gedung Sekolah Dasar, dan 1 unit gedung Sekolah Menengah Pertama. Jumlah Penduduk menurut usia kelompok pendidikan tersaji dalam tabel 4 dibawah ini.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

No.	Kelompok Pendidikan	Usia (tahun)	Jumlah (orang)
1.	Taman Kanak-Kanak	4-6	538
2	Sekolah Dasar	7-12	1789
3.	SMP/SLTP	13-15	743

Sumber: Kantor Desa Tambakrejo, 2008

Jumlah penduduk menurut usia kelompok pendidikan hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja, hal ini dikarenakan tidak adanya data yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu hal ini juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Tambakrejo akan pentingnya pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi.

4.2.3 Mata Pencaharian

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Nelayan	2105
2.	PNS	20
3.	Wiraswasta	844
4.	Petani	746
5.	Buruh Tani	936
6.	Jasa	379

Sumber: Kantor Desa Tambakrejo, 2008

Mata pencaharian penduduk Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan bervariasi. Sebagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan yang lainnya berkerja sebagai PNS, wiraswasta, petani, buruh tani dan pekerja dibidang jasa.

Tabel 4

Jumlah nelayan menurut kategori nelayan

No.	Kategori	Jumlah
1.	Nelayan Tetap	1247
2.	Nelayan Andon	489
3.	Nelayan Sambilan	369

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa dari 2015 nelyan yang ada di Desa Tambakrejo 1247 orang merupakan nelayan tetap, 489 merupakan nelayan andon dan 369 merupakan nelayan sambilan.

Dengan jumlah penduduk 7.493 jiwa yang terdiri dari 1884 Kepala Keluarga, sejumlah 1042 Kepala Keluarga merupakan keluarga dalam kategori pra sejahtera dan sejahtera I. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Sumber penghasilan terbesar masyarakat

adalah pada bidang perikanan, karena mereka memang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Mengingat terbatasnya baik ukuran maupun teknologi perahu yang dimiliki nelayan, maka aktifitas penangkapan nelayan yang masih sangat tergantung oleh musim dan kondisi oseanografi perairan laut setempat. Hal ini menyebabkan kegiatan usaha penangkapan tidak kontinyu, terbatasnya kemampuan menjangkau daerah operasi penangkapan dan berskala kecil.

4.3 Permukiman Penduduk dan Fasilitas Desa.

Permukiman yang terdapat di Desa Tambakrejo pada umumnya berupa perkampungan dan terdapat kawasan perumahan terencana yaitu Perumnas Sendang Biru. Perkampungan di Desa Tambakrejo Sendang Biru ini diantaranya:

- a. Kampung Sendang Biru;
- b. Kampung Baru;
- c. Kampung Raas;
- d. Kampung Pondokrejo;
- e. dan Kampung Kalitimbang.

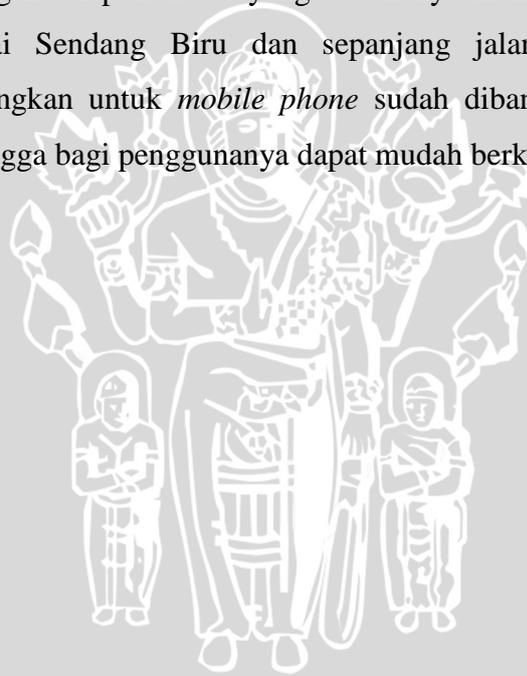
Sedangkan fasilitas yang terdapat pada perkampungan di Desa Tambakrejo ini yaitu:

- a. Fasilitas kesehatan yaitu terdapat sebuah Puskesmas Pembantu dan Posyandu.
- b. Fasilitas perdagangan yaitu pasar di Desa Tambakrejo yang menyediakan kebutuhan primer dan sekunder. Di sekitar tempat pelelangan ikan terdapat warung makan dan minum yang menunjang kegiatan pariwisata dan kios-kios yang menjualikan segar serta berbagai ikan olahan.
- c. Fasilitas perindustrian atau pergudangan yang berkaitan dengan sektor perikanan yaitu sebagai tempat penyimpanan ikan, dibangun oleh pemerintah dan di sewakan kepada pedagang ikan.
- d. Jaringan jalan Desa Tambakrejo (Sendang Biru) yang menghubungkan ke pusat kota Malang melalui ruas jalan Sendang Biru-Turen, jalur ini

merupakan bagian dari pengembangan jalur lintas selatan dengan kelas jalan arteri sekunder, sehingga kini jalur transportasi cukup lancar namun masih kurang lebar.

e. Jaringan listrik, air dan telepon:

- a) Jaringan listrik PLN sudah menjangkau seluruh dusun, namun sering terjadi pemadaman bergilir maupun gangguan non teknis lainnya.
- b) Jaringan air minum dikelola PDAM guna melayani warga di Desa Tambakrejo dengan memanfaatkan mata air Sendang Biru dan Sendang Gambir. Penduduk juga memanfaatkan air bersih yang diperoleh melalui sumur-sumur gali.
- c) Jaringan telepon kabel yang ada hanya menjangkau kawasan pantai Sendang Biru dan sepanjang jalan masuk pantai. Sedangkan untuk *mobile phone* sudah dibangun tower-tower sehingga bagi penggunanya dapat mudah berkomunikasi.



B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

a. Pihak-Pihak terkait dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

a). Konsultan Manajemen (KM)

Pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dikelola oleh Konsultan Manajemen yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Konsultan Manajemen yang menangani proyek ini pada tahun 2001 yaitu konsultan manajemen dari Yayasan Kartika Nusantara, pada tahun 2003 konsultan manajemen yang ditunjuk yaitu Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Muhammadiyah Malang.

Konsultan Manajemen ini berfungsi membantu aspek teknis dan manajemen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Program PEMP. Pendampingan ini meliputi kegiatan inventarisasi potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam modal usaha, pemetaan jalur produksi, pasar, dan konsumen serta kemungkinan pengembangan program melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

Disamping itu tugas Konsultan Manajemen juga membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dalam proses revitalisasi LEPP-M3 menjadi badan hukum koperasi dan bersama-sama dengan Tenaga Pendamping Desa (TDP) mendampingi/memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mengakses Dana Ekonomi Produktif (DEP), melakukan pendampingan teknis serta manajemen usaha. Konsultan Manajemen ini juga akan mendampingi dan memfasilitasi setiap perkembangan yang harus dilalui Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dalam upaya pemberdayaan masyarakat misalnya dalam penyelenggaraan musyawarah atau rembug desa, serta dalam upaya peningkatan kepercayaan dan semangat masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan proyek. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Nusa Patriota sebagai Pimpinan Proyek PEMP pada waktu itu yaitu sebagai berikut:

“ Konsultan manajemen disini bertugas melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan koordinasi, monitoring, supervise dan pelaporan kegiatan pelaksanaan PEMP di Satuan Wilayah Kerja yang pada pelaksanaannya diutamakan Konsultan Manajemen daerah yang diharapkan mengetahui karakter, potensi dan permasalahan daerahnya yang diharapkan mengetahui karakter, potensi dan permasalahan daerahnya...”

(Wawancara tanggal 23 Juli 2009).

Dan diungkapkan juga oleh Bapak Mohamad Suhadi selaku pelaksana Konsultan Manajemen Proyek PEMP di Kabupaten Malang, sebagai berikut :

“ Konsultan Manajemen disini melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program PEMP ini di wilayah pesisir Kabupaten Malang khususnya di lokasi sasaran Program PEMP untuk menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang ada, penanganan pengaduan serta mendukung kelancaran pelaksanaan proyek PEMP.”

(wawancara tanggal 23 Juli 2009).

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pihak Konsultan Manajemen secara berkala mengadakan kunjungan ke desa sasaran untuk mengetahui kondisi riil di lapangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini. Konsultan Manajemen juga membuka forum konsultasi bagi KMP mengenai mekanisme PEMP, dengan maksud agar tujuan keberadaan proyek ini dapat dicapai semaksimal mungkin.

b). Tenaga Pendamping Desa (TPD)

Tenaga Pendamping Desa (TPD) merupakan tenaga profesional di bidangnya yang bersedia tinggal ditengah masyarakat sasaran dan bertugas mendampingi masyarakat secara terus-menerus dalam bentuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam upaya menyiapkan rencana usaha, mengakses modal dan pengelolaan kegiatan usahanya.

TPD merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program PEMP di tingkat masyarakat. Hal ini karena posisi TPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran

program atau Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP), sehingga keberhasilan atau kegagalan usaha KMP salah satunya karena faktor keberadaan TPD.

TPD disini merupakan sebagai fasilitator dimana TPD berperan sebagai ujung tombak sosialisasi, implementasi, evaluasi dan monitoring proyek. Misi yang diemban oleh TPD adalah meningkatkan peran serta aktif masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan system kelembagaan setempat, mengenali peluang kegiatan usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan, membantu pembuatan usulan yang layak, serta mengenalkan cara dan menerapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu agar TPD lebih mudah menjalankan tugasnya, ia bermukim dan berinteraksi dengan masyarakat daerah sasaran program.

Untuk membentuk TPD ini maka Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Konsultan Manajemen melakukan perekrutan anggota TPD. Pemilihan TPD ini diharapkan nantinya dapat melaksanakan tugas TPD dengan baik. Jumlah TPD yang direkrut yaitu berjumlah 2 orang. Seperti yang diungkapkan Bapak Adi santoso sebagai salah satu TPD, sebagai berikut :

“TPD disini sebagai pelaksana proyek termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke Konsultan Manajemen dan sebagai pemberdaya masyarakat termasuk mensosialisasikan masyarakat tentang PEMP, melakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan...”
(wawancara tanggal 23 Juli 2009).

Anggota TPD disini membantu mensosialisasikan PEMP, menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melatih KMP, membantu KMP menyusun rencana Usaha, membantu administrasi pengajuan Dana Ekonomi Produktif (DEP), membantu LEPP dalam mengelola keuangan proyek dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan program PEMP berjalan lancar. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Mitra Desa yaitu Bapak Agus Suparno, sebagai berikut :

“ Penunjukkan anggota TPD ditunjuk langsung oleh Konsultan Manajemen dan disetujui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan TPD ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek karena langsung berhubungan dengan masyarakat baik dalam sosialisasi proyek dan

kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat khususnya KMP.”

(wawancara tanggal 23 Juli 2009).

c). Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3).

Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) merupakan lembaga yang menangani usaha perkreditan di daerah sasaran. Di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini yaitu Lembaga Keuangan ini bernama LEPP-M3 Malang Selatan Jaya. Lembaga ini merupakan menjadi *holding company* masyarakat pesisir dengan berbagai unit usaha, berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan program PEMP di daerah. LEPP-M3 bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Operasional PEMP Kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. LEPP-M3 mempunyai peran untuk memberikan dukungan operasional kepada KMP

Tugas LEPP-M3 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menyalurkan Dana Ekonomi Produktif Masyarakat ke KMP.
- b. Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan KMP.
- c. Membukukan penggunaan dana KMP.
- d. Melaporkan perkembangan kegiatan Program PEMP dan permodalan (keuangan) kepada penanggung jawab operasional PEMP Kabupaten.
- e. Membantu menyelesaikan KMP bermasalah.
- f. Melakukan pemeriksaan pembukuan KMP.

Susunan pengurus LEPP-M3 Malang Selatan Jaya saat ini yaitu :

- Ketua : Sumaji
Bendahara : Eka Ning W.
Sekretaris : Wiwit W.
Karyawan : 1. Rinentah
 2. Neni Linda
 3. Dini K.

d). Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP)

KMP merupakan sasaran penerima dana PEMP. Dana yang di berikan yaitu berupa Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang mana dalam PEMP ini dana tersebut digulirkan dalam bentuk pinjaman. Pembentukan KMP pada dasarnya adalah proses belajar bagi masyarakat untuk berorganisasi didalam tubuh masyarakat sendiri yang akan dapat menumbuhkan ikatan kebersamaan dan solidaritas diantara masyarakat sehingga masyarakat akan dapat memecahkan permasalahannya sendiri, terutama masalah kemiskinan. Anggota KMP ini harus memenuhi kriteria sebagai kelompok sasaran proyek dimana mereka memiliki minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok yang sama. KMP ini merupakan orang-orang dimana sebagai sasaran proyek yang yang memperoleh bantuan DEP secara kredit (harus mengembalikan secara mengangsur) untuk meningkatkan aktifitas ekonomi keluarganya baik yang berbentuk individu maupun yang berbentuk kelompok usaha bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumaji:

“ KMP ini dibentuk untuk atas dasar ikatan-ikatan pemersatu diantara orang-orang yang berkelompok dalam satu daerah sasaran program. ikatan pemersatu dapat berupa jenis usaha mereka yang sama yang terkait tempat usaha yang berdekatan atau minat usaha yang kurang lebih sama.” (wawancara tanggal 23 Agustus 2009).

Seperti yang diungkapkan pula oleh Bapak Praminto mengenai pertanyaan tentang anggota KMP, sebagai berikut:

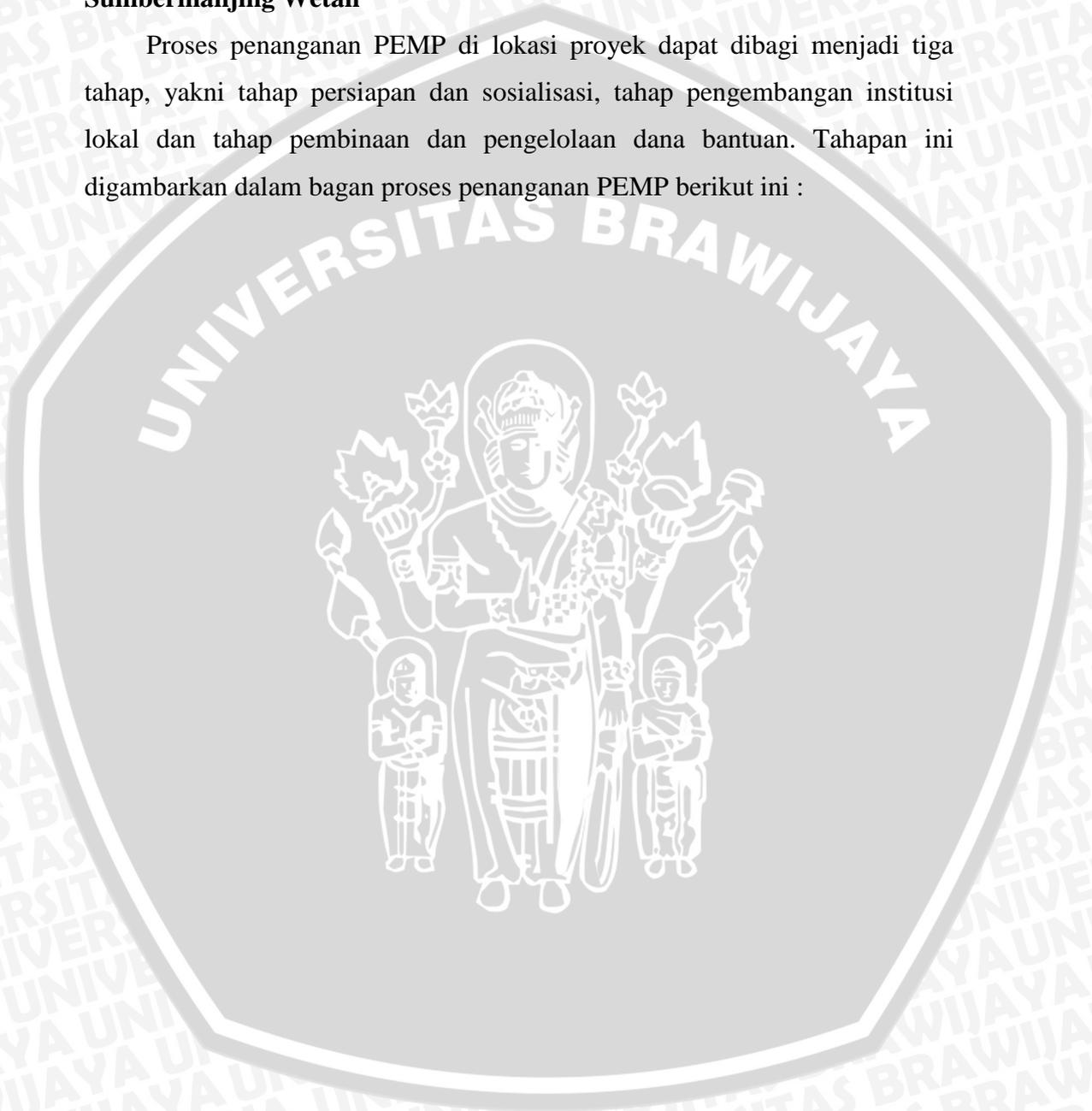
“ Anggota KMP merupakan warga miskin dengan menggunakan kriteria miskin hasil kesepakatan masyarakat dalam kegiatan diskusi kelompok terarah. namun apabila dibutuhkan dapat saja melibatkan warga yang secara ekonomi tergolong mampu dengan catatan jumlah tidak lebih dari sepertiga anggota KMP sepanjang keterlibatannya dibutuhkan warga miskin.” (wawancara tanggal 23 Agustus 2009).

Di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, pada periode 2001-2009 terdapat 5 KMP, di tempat ini KMP didasarkan pada kesamaan jenis usaha yang mereka lakukan, yaitu KMP nelayan jukung, pengolah abon, pemindang, pengasin, dan bakul. 5 KMP ini sampai saat ini telah mempunyai 498 anggota. Kegiatan ekonomi produktif yang diusulkan sebagian besar

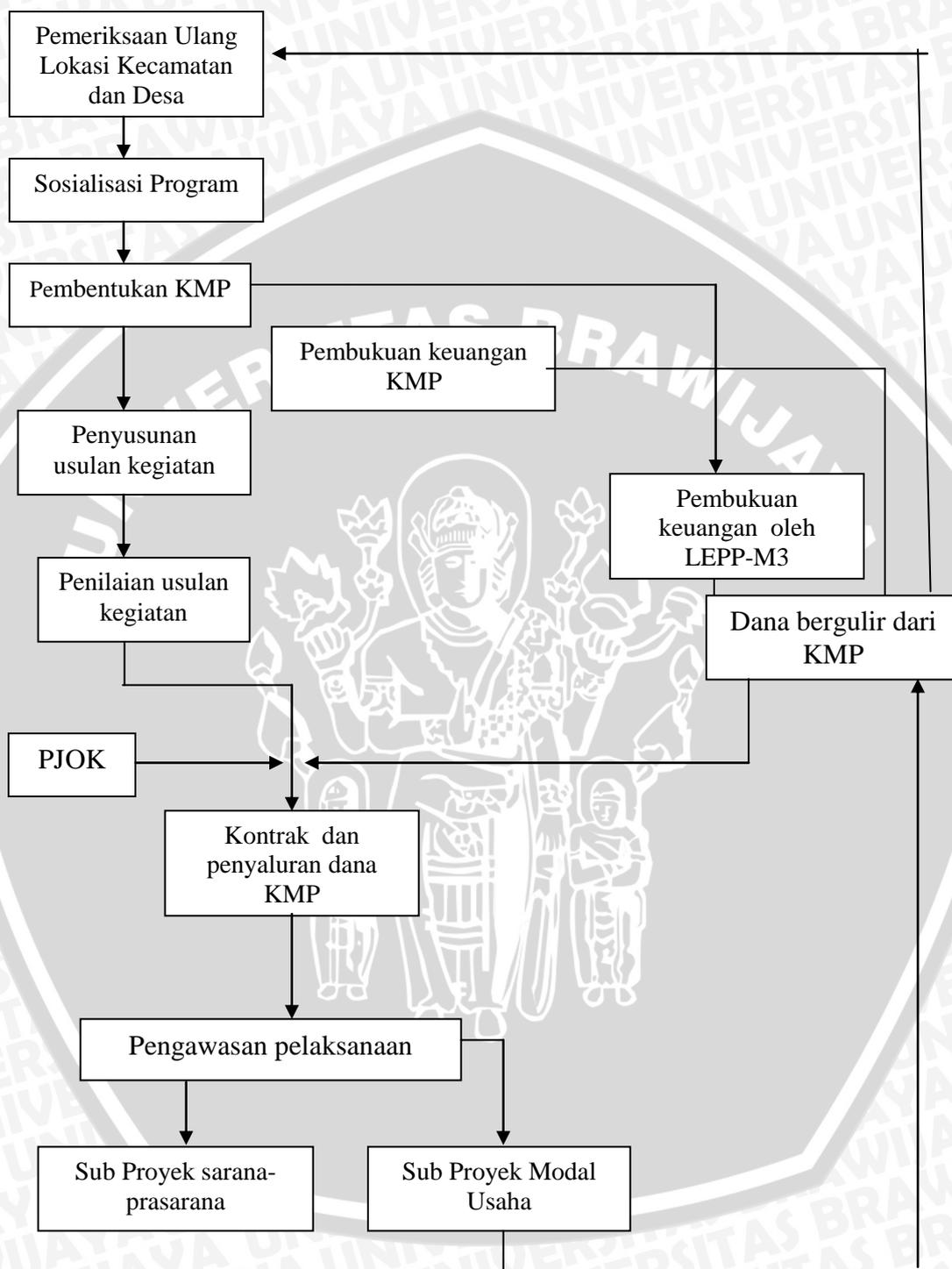
merupakan perluasan dari usaha yang telah dimiliki serta membuka bentuk usaha baru.

b. Proses Pelaksanaan PEMP di Kecamatan Desa Tambakrejo Sumbermanjing Wetan

Proses penanganan PEMP di lokasi proyek dapat dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap persiapan dan sosialisasi, tahap pengembangan institusi lokal dan tahap pembinaan dan pengelolaan dana bantuan. Tahapan ini digambarkan dalam bagan proses penanganan PEMP berikut ini :



Gambar 3
Proses pelaksanaan PEMP



Sumber: Manual Proyek

PEMP

a). Tahap Persiapan dan Sosialisasi

Pelaksanaan proyek diawali dengan Pemilihan lokasi sasaran program PEMP. Pemilihan tersebut meliputi pemilihan lokasi kecamatan dan desa yang diserahkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dibantu Konsultan Manajemen serta berkoordinasi dengan BAPEKAP dan camat dengan prioritas daerah sasaran adalah:

- a. Desa yang berpenduduk miskin relatif lebih banyak.
- b. Mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk dikembangkan atau direhabilitasi.
- c. Mempunyai dukungan kebijaksanaan pada pengembangan sumberdaya pesisir dan laut.
- d. Belum pernah atau banyak menerima bantuan program sejenis.

(Petunjuk pelaksanaan program PEMP).

Pemeriksaan desa sasaran yaitu Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Pemeriksaan ulang kelurahan sasaran adalah suatu kegiatan penilaian kembali sasaran-sasaran PEMP untuk menentukan apakah desa tersebut memang sesuai dengan kriteria lokasi sasaran PEMP. Untuk mendapatkan lokasi sasaran di tiap daerah yang telah ditetapkan, fasilitator bersama aparat setempat akan melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan data sekunder dengan data terakhir yang ada di lokasi sasaran. Disamping data tersebut, pada tahap ini aspirasi dari pihak-pihak berkepentingan akan menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan lokasi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran PEMP. Seperti di ungkap oleh Bapak Nusa Patriota, sebagai berikut:

“Pada tahap persiapan dan sosialisasi memegang peran penting pada keseluruhan pelaksanaan proyek PEMP ini karena pelaksanaan proyek diawali dengan pemeriksaan daerah sasaran, apakah daerah tersebut tersebut memang layak dalam kriteria sasaran proyek PEMP tersebut. Dan disini TPD mempersiapkan suatu konsep yang menyeluruh dan dilakukan secara terencana dan terpadu. Mulai dari tujuan yang akan dicapai, siapa saja yang akan menerima sasaran bantuan proyek PEMP ini.”

(wawancara tanggal 24 Juli 2009).

Dan disampaikan pula oleh Bapak Imam Suyudi, sebagai berikut :

“Sosialisasi PEMP di desa Tambakrejo ini dimaksudkan agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan sendiri. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab.”

(wawancara tanggal 24 Juli 2009).

Tujuan pemeriksaan ulang desa sasaran adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan PEMP akan disalurkan ke lingkungan masyarakat yang paling memerlukan dan untuk mencegah terjadinya kecemburuan dari desa-desa bukan sasaran. Adapun komponen yang dinilai atau pemeriksaan ulang meliputi jumlah keluarga pra sejahtera, mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk dikembangkan atau direhabilitasi, mempunyai dukungan kebijaksanaan pada pengembangan sumberdaya pesisir dan laut, keterlibatan sebagai lokasi sasaran program lain, serta kondisi fisik prasarana dan sarana lingkungan (misalnya jalan, pengadaan air bersih dan sebagainya).

Untuk lebih mensyaratkan PEMP di lingkungan desa, dilakukan penyebaran informasi melalui informasi langsung. Melalui proses ini diharapkan seluruh warga masyarakat di desa yang bersangkutan dapat mengetahui keberadaan PEMP dan memahami berbagai persyaratan yang diperlukan bagi tiap warga yang berkepentingan untuk menjadi peserta.

Kegiatan sosialisasi PEMP dimaksudkan agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab. Selain itu upaya sosialisasi juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya program secara lancar dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan melalui penyebaran brosur dan dengan mengadakan musyawarah tingkat desa kepada

warga Desa Tambakrejo serta melalui penyuluhan yang dilakukan oleh TPD Desa Tambakrejo.

b). Tahap Pengembangan Intitusi Lokal

Untuk mengejawantahkan konsep pemberdayaan masyarakat maka pemilihan peserta PEMP tidak ditetapkan berdasarkan kriteria atau ketentuan pihak luar, melainkan dilakukan sepenuhnya oleh warga sendiri dengan difasilitasi oleh TPD dan tokoh masyarakat, baik formal maupun informal. Hal yang sama juga dilakukan pada proses pembentukan lembaga yang akan berfungsi sebagai institusi yang dapat mewakili kepentingan warga, serta berfungsi menjaga kesinambungan proyek PEMP. Seperti diungkapkan oleh Bapak Sumaji, sebagai berikut:

“Tahap pengembangan kelembagaan ini merupakan pembentukan KMP untuk pengordinasian masyarakat yang menjadi peserta PEMP (KMP) di desa Tambakrejo. Pengorganisasian ini mengelompokkan berdasarkan kegiatan ekonomi apa yang akan dilakukan oleh KMP dan untuk memudahkan proses bergulirnya dana kepada masyarakat yang memiliki kepentingan.”
(wawancara tanggal 24 Juli 2009).

Pembentukan kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) adalah kegiatan pengorganisasian warga yang berhak menjadi peserta PEMP di desa tersebut ke dalam kelompok usaha atau kegiatan. Pengorganisasian peserta kedalam kelompok minat (berdasarkan usulan kegiatan usaha yang akan dikerjakan) akan memudahkan proses pendampingan oleh TPD, serta akan memudahkan proses perguliran dana.

Selain pembentukan KMP, pada tahap ini yang memperoleh perhatian utama adalah pembentukan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) Malang Selatan Jaya. LEPP-M3 adalah Lembaga yang menilai rencana atau usulan kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh KMP guna memperoleh dana yang akan digulirkan.

“Dan pada tahap ini juga selain membentuk KMP, disini juga membentuk suatu organisasi atau lembaga yang berkedudukan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan yaitu LEPP-M3 yang bertujuan menumbuhkan kembali solidaritas sosial sesama masyarakat agar dapat bekerja sama atau gotong royong hal ini dikarenakan LEPP-M3 didalamnya dikelola oleh masyarakat setempat yang telah dibina.”

(wawancara tanggal 24 Juli 2009).

Tujuan pembentukan LEPP-M3 ini adalah untuk menumbuhkan kembali solidaritas sesama warga agar dapat bekerja sama secara demokratis, sehingga mampu membangun kembali kehidupan masyarakat yang mandiri. Terbentuknya dan berfungsinya LEPP-M3 merupakan prasyarat bagi disalurkan dana bantuan PEMP kepada masyarakat di desa sasaran. Oleh karenanya, LEPP-M3 harus berorientasi ke bawah, mengabdikan pada kepentingan masyarakat dan bersifat relatif otonom. LEPP-M3 ini sendiri dibentuk guna memudahkan pelaksanaan dan pengelolaan dana PEMP dan menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan pelaksanaan proyek tersebut. Dengan demikian, diharapkan LEPP-M3 benar-benar menjadi lembaga yang mandiri dan independen, dan bahkan tidak dapat dipengaruhi oleh aparat desa tersebut. Di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan LEPP-M3 dibentuk pada tahun 2001 dengan nama LEPP-M3 Malang Selatan Jaya, lalu pada tahun 2004 dilakukan pengembangan kelembagaan dari LEPP-M3 Malang Selatan Jaya sehingga dapat membentuk Koperasi Mina Jaya.

c). Tahap Pengelolaan Dana PEMP

Pada tahap ini, dengan tersalurkannya dana ke masyarakat melalui berbagai proses pembinaan berupa kegiatan pendampingan dan pada akhirnya pada tahap penyaluran dana PEMP

a. Penyaluran Dana PEMP

Penyaluran dana merupakan proses dan prosedur administrasi penyaluran dana yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, sejak dari pusat, daerah, desa hingga ke KMP selaku sasaran utama PEMP. Penyaluran di tingkat pusat adalah penyaluran dana dari pemerintah ke Pemerintah daerah lalu diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah ditentukannya program tersebut dilaksanakan di lokasi sasaran yang mana, maka penyaluran dana dilakukan dengan cara mentrasfer dana ke rekening LEPP yang berada di Bank pemerintah yang telah dipilih oleh LEPP-M3 sebagai lembaga pembantu untuk menyimpan dana PEMP. Selanjutnya dana

PEMP disalurkan kepada KMP dan digulirkan terus-menerus. Seperti yang diungkap oleh saudari Eka Ning Wijayanti, sebagai berikut:

“Yang menjadi prinsip utama dalam proses penyaluran dan pencairan dana PEMP dari LEPP-M3 kepada KMP yakni bahwa dana PEMP disalurkan apabila KMP telah siap dan mampu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk dapat memperoleh dana PEMP yang dikelola LEPP-M3 hanya dapat dilakukan apabila KMP telah melakukan serangkaian kegiatan penguatan kapasitas, serta mengajukan usulan kegiatan dan usulan tersebut dinyatakan layak.”

(wawancara tanggal 8 Agustus 2009)

Tabel 4 berikut merupakan data Perkembangan dana bergulir PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini, pelaporan dari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 yaitu:

Tabel 5
Perkembangan DEP Program PEMP Kabupaten Malang
LEPP M3 “Malang Selatan Jaya”
Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Modal Awal	Perkembangan DEP (tahun)	Dana DEP (Rp)	Pemanfaat DEP (org)
Tahun 2001 dan 2003 = Rp.993.725.000	2006	4.342.781.650	760
	2007	4.656.916.650	760
	2008	4.921.826.650	783

Dari penyajian data tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan program PEMP kabupaten malang LEPP M3 “Malang Selatan Jaya” Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan pada tahun 2006 dana DEP senilai Rp. 4.342.781.650 dapat dimanfaatkan sejumlah 760 orang, pada tahun 2007 perkembangan modal meningkat yaitu sebesar Rp. 4.656.916.650 yang dimanfaatkan oleh 760 orang dan pada tahun 2008 dana berkembang menjadi Rp.4.921.826.650 yang dimanfaatkan oleh 783 orang. Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana DEP dari tahun 2006-2008 terus mengalami peningkatan diiringi dengan jumlah pemanfaat DEP.

Adapun implementasi dari Dana Ekonomi Produktif (DEP) PEMP yang diberikan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan yaitu:

1.) Pelaksanaan Unit Simpan Pinjam (USP).

Unit Simpan Pinjam (USP) merupakan unit usaha LEPP-M3 Malang Selatan Jaya) yang bergerak dibidang pelayanan permodalan bagi masyarakat pesisir di Desa Tambakrejo terutama untuk segmen usaha mikro melalui mekanisme simpan pinjam. USP diperuntukkan bagi daerah yang kondisi geografisnya dan fasilitas telekomunikasi serta fasilitas penunjang lainnya tidak memungkinkan menggunakan sistem *online*. Pelaksanaan USP ini merupakan kegiatan penyaluran dana bergulir yang dirasa efektif untuk meneruskan dana yang diberi oleh pemerintah untuk dikembangkan sehingga setelah kelompok pemanfaat yang satu telah berhasil maka dana yang dipinjam akan digulirkan kepada masyarakat yang lain.

Penyaluran dana dari LEPP-M3 kepada masyarakat dilakukan melalui perjanjian di antara lain kesanggupan masyarakat untuk mengangsur setiap bulannya sesuai dengan ketentuan, kesanggupan untuk memberikan jaminan (agunan) kepada LEPP-M3, kesediaan untuk membayar bunga 1,5% dari kredit yang diperoleh. Apabila masyarakat tidak memiliki jaminan yang memadai, maka kepala kelurahan dapat memberikan keterangan atau jaminan secara tertulis bahwa masyarakat yang bersangkutan adalah warga setempat dan akan memenuhi kewajibannya.

Persyaratan pengajuan pinjaman dana PEMP antara lain:

1. Surat permohonan dan surat pernyataan
2. Surat jaminan (BPKB/sertifikat), bagi nelayan dapat menjaminkan Hasil tangkap dari armada yang dimiliki (sekoci/payang/jukung) yang dituangkan dalam surat jaminan bermaterai Rp.6000,- dan ditandatangani oleh kepala desa.
3. Foto kopi KTP suami dan istri.
4. Foto kopi kartu keluarga (KK).
5. Pas foto terbaru 3 x 4 3 lembar.

Tabel 6
Jumlah pinjaman yang diakses dalam USP

Tahun	Jumlah Pinjaman (Rp)	Peminjam (org)
2006	676.280.000	133
2007	620.374.000	133
2008	805.467.000	147

Dari tabel diatas dapat diketahui kegiatan USP dalam hal injaman yang dilakukan oleh masyarakat. Dari tahun 2006-2008 hanya terjadi peningkatan 14 orang saja yang melakukan peminjaman modal.

2.) Pelaksanaan SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan).

Saat ini, bahan bakar minyak (BBM) merupakan input produksi yang mempunyai peranan sangat penting bagi kelangsungan usaha penangkapan ikan. Hasil identifikasi dan supervisi di berbagai sentra kegiatan nelayan menunjukkan bahwa kontribusi komponen biaya BBM terhadap keseluruhan biaya operasi penangkapan ikan per trip berkisar antara 30-50% untuk kelompok nelayan skala menengah ke atas dan 40-60% untuk kelompok nelayan skala kecil.

Dalam hal kebutuhan akan BBM, selain persoalan kenaikan harga BBM, nelayan juga dihadapkan pada harga eceran yang di atas harga yang ditetapkan pemerintah karena besarnya peran penyalur atau pengijon dalam memainkan harga di tingkat nelayan. Sebagai salah satu upaya terobosan untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM dalam jumlah yang cukup, akses mudah, dan dengan harga yang sesuai dengan harga resmi pemerintah, Dijten Perikanan Tangkap bersama Pertamina mencanangkan program pembangunan SPDN/SPBN (Solar Pocked Dealer unluk Nelayan/Stasiun Pompa Bensin untuk Nelayan).

Kegiatan pembangunan SPDN ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PK3K) berdasarkan usulan dari Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Malang yang terlebih dahulu membentuk Tim Fasilitasi SPDN yang terdiri atas Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Malang, Wira Penjualan UPMS Pertamina dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) masing-masing sebagai anggota Tim ini bertugas untuk menetapkan lokasi, calon pengelola, kontraktor pelaksana pembangunan SPDN, serta memfasilitasi terjalinnya kerjasama operasional (KSC) antara PT. Elnusa Petrofin dengan koperasi calon pengelola dan Pemda Malang.

DEP yang dialokasikan untuk kegiatan SPDN sebesar Rp.200.000.000,- dan diperuntukkan untuk :

1. Pembangunan sarana dan prasarana SPDN,
2. Delivery Order (DO),
3. Dana Operasional.

Kabupaten Malang memiliki SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) untuk melayani kebutuhan bahan bakar solar bagi armada penangkapan ikan. SPDN tersebut sebanyak 1 buah yang berlokasi di PPP Pondokdadap Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan luas lahan 300m². SPDN dibangun pada tahun 2003 dengan dana APBN melalui Program PEMP, yang dikelola oleh KUD Mina Jaya dan mendapat Kuota dari Pertamina sebanyak 216.000liter/bulan. Pada saat musim ikan jumlah kuota tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan operasional nelayan.

SPDN/SPBN bertujuan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dengan menghadirkan SPDN/SPBN yang diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir akan kebutuhan BBM dengan harga terbaik sesuai ketetapan pemerintah. Melalui program ini beban hidup masyarakat pesisir diharapkan mampu ditekan sampai pada tingkat yang signifikan.

Perkembangan SPDN tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan peningkatan pada jumlah penjualan bahan bakar solar sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Perkembangan Jumlah Penjualan Solar di SPDN
Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Tahun	Jumlah Penjualan (ltr)	Jumlah kapal yang dilayani (unit)
2006	1.968.000	8.231
2007	1.865.000	7.925
2008	2.000.000	6.766

Dari penyajian data tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah penjualan solar di SPDN Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan pada tahun 2006 jumlah penjualannya mencapai

1.968.000 perliter untuk 8.231 unit kapal yang bisa dilayani, tahun 2007 jumlah penjualan solar mencapai 1.865.000 liter yang mana melayani 7.925 unit kapal, dan untuk tahun 2008 tersedia 2.000.000 liter yang melayani 6.766 unit kapal.

Dari data di atas bisa diketahui dari tahun 2006-2007 mengalami penurunan jumlah penjualan solar sebesar 103.000 perliter dan jumlah kapal yang dilayani juga mengalami penurunan sebesar 306 unit. sedangkan pada tahun 2007-2008 mengalami peningkatan jumlah penjualan solar sebesar 135.000 akan tetapi pada jumlah kapal yang dilayani justru mengalami penurunan sebesar 1.159 unit hal ini dikarenakan jumlah kapal yang dipakai untuk menangkap ikan berkurang disebabkan oleh kerusakan, dan alasan yang lainnya yaitu digantinya kapal-kapal kapasitas sedang dengan kapal-kapal kapasitas lumayan besar sehingga kapal-kapal yang dilayani SPDN menurun.

3.) Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir di Kabupaten Malang telah dilakukan melalui berbagai bidang kegiatan baik yang bersifat konstruktif maupun pembinaan SDM. Dana Ekonomi Produktif yang dialokasikan untuk melakukan pembinaan ini yaitu Rp. 62.925.000.-. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengembangan usaha mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir dan memantapkan potensi kinerja dan usaha dari lembaga keuangan pesisir, Seksi pengelolaan Sumberdaya laut dan pesisir melaksanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan setiap tahunnya.

Tabel 8
Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat dalam Program PEMP

Tahun	Kuantitas Pembinaan	Peserta
2006	5 kali	30
2007	5 kali	30
2008	6 kali	30

Sumber : Laporan kegiatan Program PEMP 2006-2008

Kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir diperuntukkan bagi masyarakat pesisir dalam rangka Program PEMP ini. Pembinaan

dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan masyarakat pesisir agar berdaya guna dalam mendorong dinamika pembangunan sosial-ekonomi desa tersebut. Pembinaan dilaksanakan pada malam hari karena harus menyesuaikan dengan kesempatan dan waktu luang yang dimiliki peserta. Pada pagi hingga sore hari peserta sibuk dengan pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan, pedagang ikan, dan pengolah hasil tangkap dan lain-lain. Peserta pembinaan terdiri atas pengurus LEPP-M3 dan perwakilan dari KMP yang berjumlah 30 orang. Pembinaan dilakukan rata-rata perdua bulan sekali yang bertempat di Desa Tambakrejo. Tenaga pelatih (fasilitator) berasal dari Konsultan manajemen, TPD dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pemberian atau penyampaian materi kepada peserta dilakukan oleh fasilitator dengan pendekatan kemitraan. Proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan tutorial, diskusi, dan tanya jawab. Fasilitator bersama-sama peserta mendiskusikan materi yang disampaikan dan memadukan dengan pengalaman masing-masing untuk mendapatkan kesimpulan bersama, sebagai tambahan pengetahuan.

2. Manfaat Program PEMP dalam Bidang Ekonomi

Dampak yang nyata dari adanya program ini adalah meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat pesisir melalui berkembangnya usaha-usaha ekonomi produktif yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta tersedianya prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kegiatan pelaksanaannya berupa pemberian dana bergulir yang pelaksanaannya berbentuk Unit Simpan Pinjam (USP) dan SPDN yang memudahkan para nelayan untuk memperoleh bahan bakar dan untuk membantu mereka. Sampai dengan tahun 2008 Dari 2105 nelayan yang ada di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Dana Ekonomi Produktif telah dimanfaatkan oleh 783 orang.

Tabel 9
Perkembangan Pendapatan Masyarakat yang memperoleh DEP
(USP)
Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Tahun	Masyarakat memperoleh kredit (org)	Tingkat pendapatan/bulan (Rp)		
		300.000-750.000	760.000-1.000.000	1.000.000 – 5.000.000
2006	133	67	42	24
2007	133	73	47	13
2008	143	44	59	40

Sumber: Basis Data DKP 2008

Dari data yang diperoleh diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya modal yang dipinjam masyarakat di LEPP-M3 Malang Selatan Jaya maka akan disertai adanya peningkatan pendapatan Usahanya. Hal ini terjadi bila modal pinjaman yang diperoleh benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha, bukan untuk kegiatan di luar usaha misalnya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

PEMP telah memberikan manfaat kepada beberapa masyarakat miskin yang membentuk kelompok karena dengan adanya dana bergulir yang dipinjamkan oleh PEMP melalui pelaksanaan Unit Simpan Pinjam (USP) membuat masyarakat dapat melakukan usaha karena mempunyai modal selain itu juga telah memberikan manfaat untuk tambahan modal bagi masyarakat yang sudah mempunyai usaha seperti yang diungkapkan oleh Bapak Matnur selaku masyarakat yang menerima PEMP dalam wawancara sebagai berikut :

“PEMP ini sangat membantu sekali bagi para nelayan khususnya untuk nelayan kecil seperti saya dalam menambah modal usaha saya. Karena nelayan seperti saya dan kami warga disini mengandalkan hasil tangkapan serta musim ikan dalam memperoleh pendapatan sehari-hari.” (wawancara tanggal 14 Agustus 2009)

Dan Adanya SPDN yang ada di Desa Tambakrejo ini banyaknya dirasakan langsung manfaatnya oleh nelayan, antara lain:

- a) SPDN ini merupakan program nyata yang dapat menyentuh langsung pada kepentingan nelayan yaitu nelayan dapat menghemat biaya (pembelian BBM) antara Rp.100,- sampai dengan Rp.300,- per liter,
- b) Terjadinya penyerapan tenaga kerja yaitu 5 orang oleh SPDN,

Sedangkan manfaat yang ada namun tidak terasa oleh masyarakat antara lain, terbentuknya pola-pola kerja sama antar warga masyarakat di bidang ekonomi yang mana telah meningkatkan pendapatan masyarakat, yang mana telah terkonsepsya suatu mekanisme untuk memberdayakan diri melalui institusi lokal sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri.

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan proyek ini dapat diketahui dari pernyataan Bapak Sumaji selaku KMP di LEPP-M3, sebagai berikut:

“Saya kira PEMP itu sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini. Saya dan mungkin anggota KMP lainnya mendapat kredit, dan uang tersebut saya pakai sebagai modal, dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Selain bisa digunakan untuk mengangsur, untungnya bisa dibuat sebagai keperluan sehari-hari...”

(wawancara tanggal 14 Agustus 2009).

Dari segi kelembagaan, manfaat pemberian Dana bergulir lewat pelaksanaan USP ini adalah terjadinya pembentukan dan penguatan lokal sebagai embrio pelaku pemberdayaan masyarakat. Keberadaan institusi ini dapat menjadi katalis bagi pelaksanaan dan keberhasilan program-program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Pemberian wewenang penuh yang disertai pendampingan terhadap LEPP-M3 membuat lembaga ini lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mengenai manfaat pinjaman, hal ini disampaikan oleh anggota KMP, Bapak Hendro, sebagai berikut:

“Kalau bicara tentang manfaat, ya pasti bermanfaat. Pinjaman yang saya lakukan ini saya pergunakan untuk menambah modal saya sebagai nelayan pengolah ikan. Selain hasil yang saya peroleh lebih besar, alhamdulillah pendapatan saya juga meningkat. Selain bisa dipergunakan untuk mengangsur pinjaman yang saya ajukan, sisa yang saya peroleh bisa saya tabung untuk masa depan dan pengeluaran yang tak terduga...”

(wawancara tanggal 14 Agustus 2009).

Disisi lain, masyarakat menjadi lebih kondusif dan responsif dalam menanggapi program pembangunan pemerintah, dimana masyarakat tidak lagi bersikap pasif, tetapi lebih aktif dan kritis. Sikap-sikap inilah yang menjadi dasar upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Keberdayaan masyarakat ini ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk

mengidentifikasi, mendefinisikan dan menggali potensi dirinya serta memecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapainya, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Hal ini seperti diungkapkan oleh saudara Slamet anggota KMP, sebagai berikut:

“ Sejak menerima bantuan dana bergulir PEMP ini, saya, mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Selain membantu keperluan saya sebagai nelayan, istri saya juga bisa membuat warung kecil-kecilan sehingga ada tambahan pendapatan bagi keluarga saya.”
(wawancara tanggal 14 Agustus 2009).

3. Faktor yang Mempengaruhi pelaksanaan program PEMP.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program akan tidak dapat lepas kaitannya dengan faktor pendukung dan penghambat. Tujuan kita mempelajari faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan suatu program adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu program agar apabila program tersebut akan dilanjutkan pada masa yang akan datang dapat diminimalisir risikonya agar program yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan sempurna.

a. Faktor Pendukung.

Sama halnya dengan program lainnya, program PEMP juga memiliki faktor pendukung sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara dengan responden dan data yang diperoleh dari dokumen pelaksanaan PEMP serta hasil pengamatan, faktor yang mendukung implementasi program PEMP ini yaitu peran dan partisipasi stakeholder yang ada di program PEMP ini, khususnya di daerah sasaran program, yaitu warga Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Nusa Patriota tentang faktor pendukung proram ini, bahwa:

“ Faktor yang mendukung pelaksanaan PEMP ini yaitu adanya usaha serta kerja keras para pelaku PEMP ini sendiri. Hal ini dapat dilihat dari usaha mereka yang penuh kerja keras dalam melakukan setiap tugasnya demi kelancaran pelaksanaan PEMP. Dan selain stakeholder yang ada yang penting juga sebagai faktor pendukung yaitu masyarakat yang turut aktif dalam pelaksanaan PEMP ini.”
(wawancara tanggal 25 Agustus 2009).

Di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan tingkat partisipasi dari stakeholder ini sangatlah penting, karena sebagai penentu kelancaran dari PEMP ini. Selain itu faktor pendukung lainnya yang berpengaruh yaitu keterlibatan masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tanpa keikutsertaan masyarakat, maka kegiatan PEMP yang ada tidak akan berjalan lancar. Sosialisasi Program PEMP ternyata tidak kalah penting sebagai faktor pendukung, hal ini seperti di ungkap oleh Bapak Nusa Patriota, sebagai berikut:

“ Hal lain yang berpengaruh pada pelaksanaan PEMP ini yaitu pada tahap sosialisasi. Sosialisasi disini sangat membantu sebagai cara pengenalan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu Program PEMP ini dan membawa masyarakat ikut aktif terlibat dalam PEMP.”
(wawancara tanggal 25 Agustus 2009)

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan PEMP yang mana sangat membantu para pihak-pihak terkait untuk melaksanakan proses pelaksanaan kegiatan PEMP di Desa tersebut.

b. Faktor Penghambat.

Apabila ada faktor Pendukung, maka akan ada faktor penghambat. Sesuai dengan penelitian dan wawancara dengan Ketua LEPP-M3 ada 2 faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sistem Jaminan atau anggaran dalam pemberian dana. Kedua faktor ini merupakan permasalahan utama yang patut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.

a. Kredit macet.

Adanya Kredit macet dalam pemberian dana bergulir ini membuat pelaksanaan dalam USP di LEPP-M3 menjadi kurang kondusif. Kredit macet disini disebabkan karena usaha dari masyarakat bangkrut, masyarakat terkena musibah dan adanya niatan tidak membayar.

b. Dalam pengadaan Solar di SPDN terhambat karena keadaan lokasi sasaran yang jauh dan medan yang sulit.

Pendapat tentang adanya Faktor penghambat pelaksanaan PEMP ini juga disampaikan oleh Bapak Sumaji selaku Ketua LEPP-M3 , sebagai berikut:

“Ada memang faktor yang sangat kurang mendukung dari pelaksanaan kegiatan PEMP yaitu adanya kredit macet mbak. Hal ini menjadi hambatan bagi berkembangnya DEP yang ada.”
(wawancara tanggal 25 Agustus 2009).

Dari hasil ke dua wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa ada 2 permasalahan yang mendasar yang menjadi penghambat terlaksananya program ini dengan baik. Pertama adalah adanya kredit macet serta dalam pengadaan solar di SPDN terhambat karena keadaan lokasi sasaran yang jauh dan medan yang sulit.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan, namun meskipun banyak upaya telah dilakukan umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan. Sebelumnya program seperti ini umumnya menggunakan model *top down approach* yang cenderung menginterpretasikan pembangunan sebagai pengadaan pelayanan sosial, yang sepenuhnya ditentukan oleh birokrasi tanpa memperhatikan kelompok dan target group dari masyarakat. Kelemahan model ini adalah mengabaikan adanya *feed back*, membatasi kreativitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, cenderung mengabaikan peranan kelembagaan dan kapasitas lembaga yang bersifat uniform serta mengabaikan variasi sosio kultural.

Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Malang yang mendapatkan dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dimana PEMP adalah salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan

kemiskinan. Hal ini dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Tambakrejo dimana jumlah penduduk yang menunjukkan rendahnya tingkat ekonomi tahun 2008 yaitu sebesar 1084 KK dari 1884 KK yang ada.

Program PEMP telah menjadi kebijakan yang dilakukan oleh DKP dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Program ini memang tidak jauh berbeda dengan program lainnya, terutama dalam segi pelaksanaannya. Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan dan sosialisasi, tahap pengembangan institusi lokal serta tahap pengelolaan dana PEMP. Pelaksanaan PEMP ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang bertugas dalam pelaksanaannya. Dari data yang didapat tugas-tugas dari pihak yang berwenang sudah jelas, hal ini mempermudah jalannya pelaksanaan program karena adanya kejelasan tugas dan wewenang tersebut.

Proses pelaksanaan PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dimulai dengan tahap persiapan dan sosialisasi, dalam tahap persiapan dan sosialisasi ini dilakukan oleh Konsultan manajemen dan TPD. Pelaksanaan PEMP diawali dengan Pemilihan lokasi sasaran program PEMP. Pemilihan tersebut meliputi pemilihan lokasi kecamatan dan desa yang diserahkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dibantu Konsultan Manajemen serta berkoordinasi dengan BAPEKAP dan camat desa setempat.

Pemeriksaan desa sasaran yaitu Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Pemeriksaan ulang kelurahan sasaran adalah suatu kegiatan penilaian kembali sasaran-sasaran PEMP untuk menentukan apakah desa tersebut memang sesuai dengan kriteria lokasi sasaran PEMP. Dasar penetapan lain mengapa lokasi ini adalah tingginya dinamika masyarakat pesisir dengan adanya pelabuhan perikanan dan sarana pendukung penangkapan ikan lainnya dengan kata lain, Desa Tambakrejo memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk dikembangkan dan juga mengapa Desa Tambakrejo ini dipilih karena belum banyak menerima bantuan program sejenis. Tujuan pemeriksaan ulang desa sasaran adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan PEMP akan disalurkan ke lingkungan masyarakat yang

paling memerlukan dan untuk mencegah terjadinya kecemburuan dari desa-desa bukan sasaran.

Kegiatan sosialisasi PEMP dimaksudkan agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab. Selain itu upaya sosialisasi juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya program secara lancar dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat berkelanjutan.

Sosialisasi dalam setiap kegiatan pembangunan memegang peranan yang teramat penting dan menentukan keberhasilan PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebab proses sosialisasi ini merupakan titik awal dari kegiatan PEMP. Sosialisasi dilakukan melalui penyebaran brosur kepada warga Desa Tambakrejo serta melalui penyuluhan yang dilakukan oleh TPD Desa Tambakrejo. Selain itu sosialisasi di Desa Tambakrejo ini dilakukan dengan cara Musyawarah tingkat desa. Dengan kegiatan ini, maka diharapkan masyarakat dapat secara langsung memperoleh informasi tentang PEMP serta mempelajari dan mengetahui lebih banyak tentang PEMP sehingga dengan adanya sosialisasi ini maka akan tertanam kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi di desanya dalam rangka melaksanakan program PEMP ini.

Dalam tahap sosialisasi merupakan bagian dari proses penyadaran masyarakat untuk memberdayakan diri sesuai dengan pendapat Sulistiyani (2004: 83-84), dimana tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan sadar akan potensi yang dimilikinya dan mempunyai keinginan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik.

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan persiapan dan sosialisasi PEMP telah dilakukan cukup baik, hal ini didukung oleh adanya

proses pelaksanaan PEMP yang telah dilaksanakan, seperti pertama, terbentuknya KMP walaupun KMP pada akhirnya sekarang menjadi hanya sebatas formalitas untuk meminjam dana yang ada, jadi pada pelaksanaannya masyarakat bukan lagi terbentuk kelompok melainkan perorangan.

Dalam pelaksanaan PEMP ini terdapat 3 pendekatan yang dilakukan yaitu:

1. Kelembagaan;
2. Pendampingan;
3. Adanya Dana bergulir (revolving fund).

Semua pendekatan diatas telah dilakukan oleh DKP dalam pelaksanaan PEMP di Desa Tambakrejo, yang hasilnya yaitu terbentuknya kelembagaan ekonomi yang ada di masyarakat yaitu LEPP-M3 Malang Selatan Jaya. Adanya pendampingan mulai dari tahap persiapan, sosialisasi hingga pelaksanaan kegiatan PEMP yang di dampingi oleh pihak-pihak yang dipercaya DKP untuk mendampingi yaitu KMP serta TPD yang telah ditunjuk. Serta pelaksanaan PEMP yaitu adanya dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat. Implementasi dari adanya dana bergulir tersebut yaitu adanya USP dan SPDN yang ada di Desa Tambakrejo ini, serta adanya pembinaan kelompok ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian yang didapatkan pelaksanaan dari USP itu sendiri kurang begitu efektif dilaksanakan, hal ini dikarenakan hanya sebagian dari penduduk saja yang mampu mengakses modal berupa pinjaman tersebut. Dari 1804 KK yang merupakan masyarakat miskin hanya 135 pertahunnya orang yang bisa mengakses pinjaman di USP ini. Tentang pelaksanaan SPDN telah cukup baik dilaksanakan. Hadirnya SPDN ini dirasa sangat membantu masyarakat khususnya nelayan dalam pemenuhan kebutuhan akan BBM (solar). Dan yang terakhir yaitu adanya kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang pelaksanaannya sudah cukup baik. Dengan adanya pembinaan seperti itu masyarakat diharap untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan masyarakat pesisir agar berdaya guna dalam mendorong dinamika pembangunan sosial-ekonomi desa mereka.

Program pemberdayaan masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, program yang berpangkal dan berbasis

masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, program yang berasal dari bawah yang berarti bahwa masyarakatlah yang mengusulkannya, serta program yang bersifat advokasi karena peran orang luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada masyarakat. Dalam pembangunan yang mengedepankan masyarakat atau rakyat pemerintah hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Rakyat harus mendapat tempat untuk mengembangkan kemampuan. Apabila masyarakat diatur dan hanya dijadikan objek maka pemerintah akan kesulitan sendiri, karena seterusnya masyarakat tetap akan tergantung. Lain halnya jika masyarakat diberi kewenangan, maka masyarakat akan bisa mandiri.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, terdapat tiga proses pentahapan pemberdayaan masyarakat yang perlu dilalui (Priyono, 1996 dalam suryono, 2006 hal. 147) yaitu:

4. Inisiasi. Masyarakat mendapatkan keberdayaan diri dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar dan diperuntukkan bagi masyarakat.
5. Partisipatoris. Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat.
6. Emansipatif. Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari, oleh, dan untuk mereka.

Menurut hasil dari pengamatan peneliti, pemberdayaan masyarakat yang terwujud melalui Program PEMP dalam tahapan pemberdayaan masyarakat masih pada tahap inisiasi dan partisipatoris. Hal ini dikarenakan masih adanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program. Campur tangan yang dilakukan oleh DKP adalah dalam hal teknis pelaksanaan serta pembiayaan program.

Konsep pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh program ini terkendala oleh jumlah masyarakat miskin yang mengikuti program ini. Tidak semua masyarakat miskin menjadi anggota kelompok masyarakat dalam program ini. Hal ini disebabkan karena masih adanya sebagian masyarakat yang tidak berani untuk meminjam dana yang ada karena takut tidak bisa mengembalikannya. Hal ini patut disayangkan karena hanya sebagian

masyarakat miskin saja yang terbantu dengan program ini. Dan yang disayangkan pula adalah dimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini masih masyarakat hanyalah sebagai penerima bantuan uang saja dan selebihnya itu masyarakat hanya diberi tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tepat dengan waktunya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berjalan lebih efektif apabila masyarakat penerima bantuan diberi kesempatan untuk memperoleh pelatihan yang lebih berkualitas khususnya menyangkut usaha dan peningkatan keterampilan agar masyarakat lebih kreatif dalam memilih usaha. Tentunya pendekatan ini harus dapat dilengkapi dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan dengan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pesisir setempat.

2. Manfaat Program PEMP dalam Bidang Ekonomi

Dalam Upayanya mengentaskan kemiskinan, pemerintah tak hentinya dalam membuat program-program sebagai proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan khususnya masyarakat pesisir. Sehingga perlu adanya suatu formulasi kebijakan yang mampu mengadopsi semua dimensi kemiskinan tersebut. Pemberdayaan dipandang sebagai suatu strategi yang dapat memenuhi keinginan tersebut. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi diharap dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya pada masyarakat pesisir.

Kemiskinan secara umum ditandai dengan adanya kondisi bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktifitas maupun usaha menjadi sangat terbatas. Dan bertolak pada pendapat Siagian (2005: 80) bahwa penduduk miskin dihadapkan pada “lingkaran setan” yang mengandung komponen:

1. Pendapatan perkapita rendah.
2. Yang berakibat pada ketidakmampuan menabung.
3. Yang pada gilirannya berakibat pada tidak adanya investasi.
4. Tidak adanya investasi berarti tidak adanya perluasan usaha.
5. Tidak adanya perluasan usaha berarti makin sempitnya kesempatan kerja.
6. Sempitnya lapangan kerja berarti tingginya tingkat pengangguran.
7. Pengangguran berarti tidak adanya penghasilan.
8. Tidak adanya penghasilan berakibat pada tidak bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Dengan adanya lingkaran setan tersebut maka dengan adanya bantuan dari program PEMP ini yang berupa pinjaman yang diberikan kepada anggota KMP maka akan dapat meningkatkan pendapatan, dan memberikan kesempatan lapangan usaha baru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan menunjukkan bahwa modal yang diberikan lewat pinjaman ini maka akan meningkatkannya pula produktifitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota KMP sehingga keuntungan yang mereka dapat semakin besar dan akhirnya meningkatkan pendapatan mereka tiap bulannya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari bahkan untuk masa depannya pula. Namun sayangnya pelaksanaan dari USP ini menurut peneliti kurang begitu efektif karena hanya bermanfaat bagi sekelompok kecil orang saja.

Dari hasil penelitian yang telah didapat, pelaksanaan PEMP ini banyak dirasakan manfaatnya pada implementasi SPDN, karena pelaksanaan SPDN inilah yang dirasa merupakan kegiatan yang langsung menyentuh pada SPDN ini merupakan program nyata yang dapat menyentuh langsung pada kepentingan nelayan yaitu nelayan dapat menghemat biaya (pembelian BBM) antara Rp.100,- sampai dengan Rp.300,- per liter, dan terjadinya penyerapan tenaga kerja yaitu 5 orang oleh SPDN. Dan dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai manfaat dalam memberikan pengetahuan, ketrampilan bagi masyarakat untuk selalu meningkat produktifitasnya dalam mengelola usaha yang mereka tekuni.

Namun pada dasarnya dengan adanya pelaksanaan PEMP ini, diharap manfaat untuk masyarakat menjadi lebih kondusif dan responsif dalam

menanggapi program pembangunan pemerintah, dimana masyarakat tidak lagi bersikap pasif, tetapi lebih aktif dan kritis. Sikap-sikap inilah yang menjadi dasar upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Keberdayaan masyarakat ini ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menggali potensi dirinya serta memecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapainya, terutama dalam masalah sosial ekonomi.

3. Faktor yang Mempengaruhi pelaksanaan PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada masyarakat untuk secara aktif, menetapkan, melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan program. Dengan kata lain program PEMP memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk aktif. Kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan ini menuntut dukungan sepenuhnya dari seluruh komponen yang ada dan kerjasama antar pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar sebagai kelompok sasaran. Dan dalam suatu program terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat dari hasil penelitian serta data-data yang didapat peneliti.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari pelaksanaan program PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini yaitu karena menggunakan pendekatan pemberdayaan yang mana memberikan kesempatan pada masyarakat seluas-luasnya untuk turut serta dalam program ini baik mulai perencanaan, pelaksanaannya dan pengambilan keputusan. Sehingga dalam pelaksanaannya timbullah partisipasi masyarakat. Tidak hanya masyarakat saja yang aktif berpartisipasi namun faktor pendukung lainnya yaitu adanya kerja keras dari TPD dan perangkat desa Tambakrejo dalam menjalankan tahap demi tahap proses pelaksanaan PEMP di desa tersebut. Selain itu sosialisasi merupakan

faktor penentu juga dalam pelaksanaan PEMP di desa ini. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program tersebut dengan aktif dan penuh tanggung jawab.

b. Faktor Penghambat

Hambatan dari pelaksanaan kegiatan PEMP berupa USP yaitu adanya kredit macet. kemacetan kredit disebabkan oleh hal-hal seperti adanya kebangkrutan dari usaha masyarakat yang meminjam dana, adanya musibah yang menimpa peminjam, dan adanya niatan dari peminjam untuk tidak membayar pinjaman, hal ini karena ada pandangan bahwa dana pemberdayaan ini merupakan pemberian cuma-cuma pemerintah kepada rakyatnya, sehingga peminjam tidak wajib hukumnya untuk mengembalikan. Persepsi seperti inilah menunjukkan ketidaksiapan mentalitas masyarakat dalam mengelola dana hibah dari negara. Namun dalam hal ini dapat diatasi dengan adanya Sistem anggunan atau adanya jaminan dalam meminjam dana ekonomi produktif ini. Sistem ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, sehingga dana yang ada dapat berkembang sehingga dapat dipergunakan sebagai pinjaman bagi masyarakat lain yang ingin meminjam dana tersebut. Dan pada pelaksanaan kegiatan ekonomi di SPDN, yaitu adanya keterlambatan pasokan solar ke lokasi karena lokasi sasaran yang jauh dan sulit ditempuh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian hasil dan pembahasan terhadap fokus yang diteliti seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, seluruh kegiatan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dilakukan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan mulai tahap persiapan dan sosialisasi, tahap pengembangan institusi lokal dan tahap pengelolaan dana PEMP. Pada intinya implementasi program PEMP di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam semua pelaksanaan kegiatan seperti USP, SPDN serta pembinaan yang selalu dilaksanakan setiap tahun.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan mempunyai manfaat besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat pemanfaat DEP serta para nelayan yang dapat memanfaatkan SPDN guna mendapat kebutuhan solar di bawah harga eceran tertinggi. Dari pelaksanaan kegiatan PEMP tersebut manfaat yang didapat yaitu adanya peningkatan pendapatan bagi orang yang mendapat pinjaman di USP, ada pula peningkatan lapangan pekerjaan baik dari pelaksanaan USP dan SPDN.
3. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan yaitu:
 - a. Faktor Pendukung yaitu partisipasi stakeholder yang ada di program PEMP ini baik pengurus program serta masyarakat yang turut aktif dalam program ini. Berkat kerja keras mereka

pelaksanaan program PEMP ini berjalan dengan baik sampai sekarang dan menunjukkan keberlangsungan program.

- b. Faktor Penghambat dari pelaksanaan kegiatan PEMP yaitu adanya kredit macet dari pelaksanaan USP dan pada pelaksanaan SPDN terhambat karena pasokan bahan bakar yang kadang terganggu karena lokasi tempat SPDN yang sulit.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran-saran bagi penyempurnaan dan perbaikan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program, sehingga dapat tercapai pemahaman yang baik pada masyarakat sasaran sehingga dalam setiap kegiatan mereka turut berpartisipasi.
2. Perlu adanya penyuluhan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sehingga masyarakat mampu dan lebih berani untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan menyadari dan mengetahui potensi alam yang ada di desa mereka.
3. Untuk meminimalisasi adanya dampak negatif dari suatu kebijakan khususnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini hendaknya dilakukan analisa mendalam terlebih dahulu terutama hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat setempat. Sikap ketergantungan pemerintah desa terhadap dana bantuan hendaknya dapat diperkecil dengan adanya pembinaan pasca kegiatan guna penumbuhan kemandirian baik untuk pemerintah desa tersebut, lembaga keuangan yang ada serta masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dinas Kelautan dan Perikanan, 2009. "Profil DKP dan Program PEMP". Diakses melalui www.dinas.kelautan.perikanan.co.id pada 10 Juli 2009.
- Friedman, John, 1992. *Empowerment : The Politics Of Alternative Development*. Cambridge : Blackwell.
- Hasan, Iqbal, M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Islamy, M. Irfan, 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Mamadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CDIS.
- Kusumastanto, MS., Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo, 2003. *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta : LKiS.
- , 2006. *Filosofi pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung : Humaniora.
- , 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta : LKis
- BBPMD, 2005. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: BBPMD.
- Moleong, Lexy. J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh, 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pranarka, A.M.W dan Onni S. Prijono, 1996. *Pemberdayaan, konsep, kebijakan dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Siagian, Sondang P, 2007. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta : Bumi aksara.
- Siswanto, Budi, 2008. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Surabaya : Laksbang Mediatama.

Siswanto, Budi, 2008. *Nelayan dan Politik Perikanan*. Surabaya : Papyrus.

Soenarko, 2006. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Pers.

Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

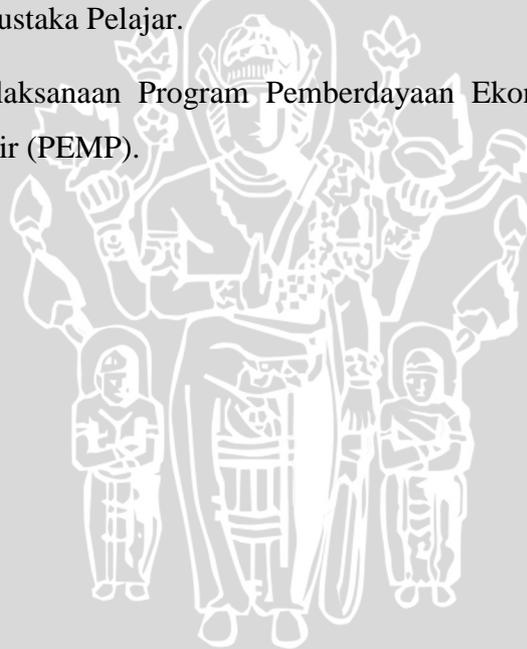
Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.

Suryono, Agus, 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Malang : UM press.

Solihin, Akhmad, etal, 2005. *Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Bandung : Humaniora.

Usman, Sunyoto, 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Petunjuk teknis pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).



LAMPIRAN



INTERVIEW GUIDE

A. Masyarakat

1. Apakah anda tahu tentang program PEMP?
2. Bagaimana sikap anda menanggapi program tersebut?
3. Apakah program tersebut bermanfaat?
4. Dalam hal apa program tersebut dapat dirasakan manfaatnya?
5. Dana pinjaman dari LEPP-M3 yang ibu/bapak dapat digunakan untuk apa?
6. Apakah sebelum dan sesudah mendapatkan PEMP ada perbedaan struktur ekonomi dilihat dari segi:
 - a. Status pekerjaan
 - b. Penghasilan

B. Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Seperti apakah gambaran umum tentang program PEMP ini?
2. Bagaimanakah dengan struktur pelaksana program ini?
3. Bagaimanakah alur tahapan pelaksanaan program ini?
4. Apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program ini?

C. Konsultan Manajemen dan Tenaga Pembantu Desa

1. Apakah saja tugas yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen dan Tenaga Pembantu Desa dalam pelaksanaan Program PEMP ini?

DOKUMENTASI







